

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)

DI KOTA PEKANBARU

(STUDI KASUS : KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU)

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat

Guna mendapatkan gelar sarjana teknik

Pada fakultas Teknik Universitas Islam Riau



RAHMI PUTRI JONI

143410325

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA
TANPA KUMUH) DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS: KELURAHAN PESISIR KECAMATAN
LIMPULUH KOTA PEKANBARU)**



TUGAS AKHIR

Disusun Oleh

RAHMI PUTRI JONI

143410325

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Faizan Dalila ST., M.Si

Pembimbing II

Rona Muliana ST., MT

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Teknik

Ir. H. Abdul Kudus, MT

Ketua Program Studi

Puji Astuti, ST., MT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Putri Joni
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 03 Mei 1996
Npm : 143410325
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Gg. Darul Na'im No 15

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada:

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota
Jenjang Pendidikan : S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar dan asli dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)"

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan/atau menuntut karena tugas akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulis atau karya orang lain (plagiat) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya menerima sanksi dengan peraturan perundang yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 15 Desember 2019




Rahmi Putri Joni
143410325

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA
KUMUH) DI KOTA PEKANBARU
STUDI KASUS : KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH**

RAHMI PUTRI JONI

143410325

ABSTRAK

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanganan permukiman kumuh yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah terlaksana di Kota Pekanbaru salah satunya di Kelurahan Pesisir. Namun belum diketahui seberapa besar ketercapaian program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif digunakan untuk menghitung ketercapaian program dan kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil dari ketercapaian program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang didapatkan melalui observasi, dokumentasi, telaah pustaka, wawancara, dan angket.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir pada tahun 2017-2018 untuk pembangunan infrastruktur ketercapaian program hanya sebesar 22 % dan masih ada 78% lagi yang belum terealisasi. Infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU Kelurahan Pesisir yang sudah meningkat adalah jalan lingkungan 18,67 %, drainase lingkungan 5,81%, pengelolaan air limbah 9,09% dan pengolahan persampahan 40%. Kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman yang termasuk kedalam tingkat kesejahteraan rendah 9,09%, tingkat kesejahteraan sedang 86,86% dan tingkat kesejahteraan tinggi 4,04%.

Kata Kunci : Evaluasi, Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Infrastruktur

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE KOTAKU
PROGRAM (KOTA TANPA KUMUH) IN PEKANBARU CITY
CASE STUDY: PESISIR VILLAGE LIMAPULUH SUB-DISTRICT**

RAHMI PUTRI JONI

143410325

ABSTRACT

The KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Program is one of the government's efforts to accelerate the handling of slums which aims to improve access to infrastructure and basic services in settlements and improve the welfare of the people in urban areas. The KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program has been implemented in Pekanbaru City, one of which is in the Pesisir Village. However, it is not yet known how much the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program has achieved, so this research aims to evaluate the success of the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program in the Pesisir Village.

This research uses a deductive approach. The method used in this research is quantitative and qualitative descriptive. Quantitative is used to calculate program achievements and qualitative is used to explain the results of KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program achievements. Data collection techniques in this study use primary and secondary data, obtained through observation, documentation, literature review, interviews, and questionnaires.

The results of the study explained that the activities of the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program in the Coastal Villages in 2017-2018 for infrastructure development achieved only 22% of the program and 78% were still unrealized. Infrastructure and basic services in settlements through the implementation of the KOTAKU Coastal Village program that have increased are 18.67% environmental roads, 5.81% environmental drainage, 9.09% wastewater management and 40% solid waste treatment. Public welfare through the provision and improvement of the quality of settlements included in the low welfare level 9.09%, moderate welfare level 86.86% and high welfare level 4.04%.

Keywords: Evaluation, KOTAKU Program (City without Slums), infrastructure

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pekanbaru. (Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)*” untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dari penyusunan tugas akhir ini diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam penerapan ilmu di bidang perencanaan. Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Hal ini karena dipengaruhi dengan pengalaman serta ilmu yang penulis miliki.

Kemudian juga penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuan terutama kepada:

1. Bapak Ir. H. Abdul Kudus, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
2. Ibu Puji Astuti, ST.,MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
3. Bapak Muhammad Sofwan, ST.,MT selaku sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
4. Bapak Faizan Dalilla, ST.,M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini

5. Ibu Rona Muliana, ST.,MT selaku pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini
6. H.Joni dan Hj.Netriwati selaku orang tua penulis yang telah memberikan support kepada penulis
7. Nola Revinda S.T, Silmia Dahnil S.H, Ananda Mentari Nadya S.H, Mega Mellawati S.Psi dan Nisa Nura Ningsih S.Psi yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
8. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan Proposal Tugas Akhir ini. Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Demikian dengan selesainya penelitian ini, penulis mengharapkan semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, Desember 2019

Rahmi Putri Joni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Sasaran	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Ligkup Penelitian.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Materi.....	7
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.6 Kerangka Berfikir.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Evaluasi Progran	12
2.1.1 Pengertian Evaluasi Program	12
2.1.2 Tujuan Evaluasi Program	14
2.1.3 Konsep dan Evaluasi Program	14
2.1.4 Ciri-ciri dan Persyaratan Evaluasi Program	18
2.1.5 Model-model Evaluasi Program	19
2.2 Implementasi/Pelaksanaan	22
2.3 Kesejahteraan Masyarakat	22
2.4 Partisipasi Masyarakat	26
2.5 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).....	27

2.5.1 Pengertian Program KOTAKU	27
2.5.2 Tujuan Program KOTAKU	29
2.5.3 Strategi dan Prinsip	31
2.6 Infrastruktur KOTAKU	34
2.7 Kaitan Program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) dengan Perencanaan Wilayah dan Kota	38
2.8 Sintesa Teori	39
2.9 Keaslian Penelitian	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	47
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.4.1 Data Primer	47
3.4.2 Data Sekunder	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Waktu Pengambilan Data Primer	49
3.7 Teknik Analisis Data	49
3.7.1 Teridentifikasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir	49
3.7.2 Mengetahui Peningkatan Terhadap Akses Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar Di Kelurahan Pesisir	51
3.7.3 Teridentifikasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	52
3.8 Populasi dan Sampel	53
3.7.1 Populasi	53
3.7.2 Sampel	53
3.9 Variabel Penelitian	55
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	58
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	58

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	58
4.1.2 Kependudukan Kota Pekanbaru	61
4.1.3 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru	62
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Limapuluh	63
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
4.3.1 Kelurahan Pesisir	66
4.3.2 Kependudukan Kelurahan Pesisir	68
4.3.3 Kawasan Kumuh di Kelurahan Pesisir.....	68
4.3.4 Kondisi Jalan dan Drainase di Kelurahan Pesisir	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Identifikasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Program KOTAKU Di Kelurahan Pesisir	73
5.2 Peningkatan Akses Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar Permukiman Melalui Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Pesisir	84
5.2.1 Bangunan Gedung	85
5.2.2 Jalan Lingkungan	86
5.2.3 Penyediaan Air Bersih/Air Minum	87
5.2.4 Drainase Lingkungan	88
5.2.5 Sanitasi/Pengelola Air Limbah	89
5.2.6 Pengelolaan Persampahan	91
5.2.7 Ruang Terbuka Publik.....	92
5.2.8 Pengamanan Kebakaran	92
5.2.9 Rekapitulasi Peningkatan Terhadap Akses Infrastruktur	93
5.3 Identifikasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	93
5.3.1 Pendapatan	94
5.3.2 Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga	95
5.3.3 Keadaan Tempat Tinggal	96
5.3.4 Fasilitas Tempat Tinggal.....	97
5.3.5 Kesehatan Anggota Keluarga.....	98
5.3.6 Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.....	99

5.3.7	Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan	100
5.3.8	Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi	101
5.3.9	Rekapitulasi Hasil Responden Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	102

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 104

6.1	Kesimpulan	104
-----	------------------	-----

6.2	Saran.....	104
-----	------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	25
Tabel 2.2 Sintesa Teori	40
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Waktu Pengambilan Data Primer.....	49
Tabel 3.2 <i>Range</i> Penilaian Keberhasilan Program.....	50
Tabel 3.3 Penilaian Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	52
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Pesisir.....	53
Tabel 3.5 Desain Survei	56
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	61
Tabel 4.3 Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Kota Pekanbaru	62
Tabel 4.4 Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru	63
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Limapuluh	64
Tabel 4.6 Luas Wilayah Kelurahan Pesisir Menurut RW.....	66
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	68
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga (RW).....	68
Tabel 4.9 Luas Deliniasi Kumuh Kelurahan Pesisir	69
Tabel 4.10 Kondisi Jalan Lingkungan	69
Tabel 4.11 Kondisi Drainase Lingkungan	71

Tabel 5.1 Capaian Pelaksanaan Program KOTAKU Kelurahan Pesisir.....	78
Tabel 5.2 Range Penilaian Keberhasilan Program.....	80
Tabel 5.3 Kegiatan Yang Terealisasi Tetapi Tidak Sesuai Rencana	83
Tabel 5.4 Spesifikasi Peralatan	91
Tabel 5.5 Rekapitulasi Peningkatan Akses Infrastruktur.....	93
Tabel 5.6 Jumlah Responden Menurut Pendapatan	94
Tabel 5.7 Jumlah Responden Menurut Konsumsi Atau Pengeluaran Rumah Tangga	95
Tabel 5.8 Jumlah Responden Menurut Keadaan Tempat Tinggal.....	96
Tabel 5.9 Jumlah Responden Menurut Fasilitas Tempat Tinggal	97
Tabel 5.10 Jumlah Responden Menurut Kesehatan Anggota Keluarga	98
Tabel 5.11 Jumlah Responden Menurut Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.....	99
Tabel 5.12 Jumlah Responden Menurut Kemudahan Memasukkan Anak Ke Jenjang Pendidikan.....	100
Tabel 5.13 Jumlah Responden Menurut Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi.....	101
Tabel 5.14 Rekapitulasi Hasil Kesejahteraan Masyarakat.....	102
Tabel 5.15 Penilaian Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	9
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	60
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Limapuluh.....	65
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kelurahan Pesisir.....	67
Gambar 5.1 Sesudah Sebelum Pembangunan Jalan Lingkungan.....	87
Gambar 5.2 Sesudah Sebelum Pembangunan Drainase Lingkungan.....	89
Gambar 5.3 Sesudah Sebelum Pembangunan MCK.....	90
Gambar 5.4 Gerobak Sampah.....	92
Gambar 5.5 Grafik Jumlah Responden Menurut Pendapatan.....	95
Gambar 5.6 Grafik Jumlah Responden Menurut Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga.....	96
Gambar 5.7 Grafik Jumlah Responden Menurut Keadaan Tempat Tinggal.....	97
Gambar 5.8 Grafik Jumlah Responden Menurut Fasilitas Tempat Tinggal .	98
Gambar 5.9 Grafik Jumlah Responden Menurut Kesehatan Anggota Keluarga.....	99
Gambar 5.10 Grafik Jumlah Responden Menurut Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.....	100
Gambar 5.11 Grafik Jumlah Responden Menurut Kemudahan Memasukkan Anak Ke Jenjang Pendidikan.....	101
Gambar 5.12 Grafik Jumlah Responden Menurut Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Menanggapi tentang permasalahan kumuh tersebut Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada 2019 Indonesia bebas dari permukiman kumuh. Salah satu upaya pemerintah adalah membuat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan seperti, Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Ruang Terbuka Publik dan Pengamanan Kebakaran. Guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut terkandung dua maksud, yakni *pertama*, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. *Kedua*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah. (Surat Edaran Ditjen Cipta Karya, 2016)

Program ini telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia yang kawasannya dikatakan kumuh. Melalui program KOTAKU munculnya sejumlah warga masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang peduli terhadap lingkungan secara khusus dan terhadap pengentasan Kawasan Kumuh Perkotaan. Diharapkan nantinya masyarakat akan lebih menjaga dan memelihara hasil pembangunan menuju kondisi lingkungan permukiman yang lebih baik. Sehingga tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, berjati diri tanpa kumuh dan lestari segera terwujud. Program KOTAKU ini telah ada di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2014-2019, program ini telah dilaksanakan sekitar 3-4 tahun lamanya dan akan ditargetkan tercapai tujuannya di tahun 2019.

Program KOTAKU sudah banyak dilaksanakan pada beberapa kota di Indonesia. Diantaranya : Padang, Solo, Surabaya, Jakarta dan Bandung. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua kota berhasil melaksanakan program tersebut dengan baik. Diantara kota yang berhasil melaksanakan program KOTAKU adalah Kota Padang tepatnya di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto pemerintahnya telah melaksanakan program KOTAKU ini dan di tahun 2017 tepatnya di bulan Desember pemerintah daerahnya mengatakan bahwa program tersebut telah 90% berhasil dan hanya tinggal finishing. (Portal Berita Editor, 2017)

Sedangkan kota yang tergolong gagal melaksanakan program KOTAKU adalah Kota Solo. Masyarakat Kota Solo diresahkan oleh pelaksanaan program

KOTAKU yang berhenti di tengah jalan, sehingga mengganggu masyarakat dan menimbulkan dampak negatif. Misalnya, lubang-lubang yang dibuat di pinggir jalan untuk proyek perbaikan drainase. Ada pekerjaan yang terhenti sementara waktu, sehingga lubang dan material itu justru membahayakan masyarakat pengguna jalan. Saat ditelusuri lebih dalam ternyata permasalahan itu terjadi karena keterbatasan dana. Karena pencairan dana program KOTAKU di Solo dibagi menjadi tiga tahap. Pertama 60 persen, 30 persen dan 10 persen. Program yang seharusnya dikelola masyarakat itu justru diberikan kepada pihak ketiga. (Jawa Pos Radar Solo, 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, program KOTAKU dapat memperkecil persentase kawasan kumuh di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut dokumen program KOTAKU pada tahun 2016 jumlah total kawasan permukiman kumuh di Indonesia mencapai 35.291 Ha. Salah satu provinsi yang memiliki kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah Provinsi Riau dengan luas total kawasan permukiman kumuh adalah 254,83 Ha. Permukiman kumuh ini tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Dari kabupaten/kota tersebut Kota Pekanbaru adalah kota yang memiliki kawasan permukiman kumuh terbesar dengan luas 79,54 Ha. (kotaku.pu.go.id, 2016)

Program KOTAKU tersebut juga sudah terlaksana di Kota Pekanbaru dan sudah ditetapkan dalam keputusan Walikota Pekanbaru No 15 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Diantaranya tersebar di beberapa Kecamatan/Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya yaitu Kecamatan Limapuluh Kelurahan Pesisir.

Kelurahan Pesisir merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai atau bisa dikatakan memiliki lokasi yang strategis itu dapat dikatakan karena Kelurahan Pesisir dekat dengan pusat Kota Pekanbaru, selain itu Kelurahan Pesisir juga merupakan sebuah kawasan perdagangan dan jasa, dan Kelurahan Pesisir tersebut lokasinya juga dekat dengan sebuah pelabuhan yang tingkat pelayanannya cukup tinggi baik domestik maupun internasional. Kelurahan Pesisir termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP-I) Kota Pekanbaru, yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat perkantoran dan kawasan permukiman, sehingga menjadi sangat penting penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Pesisir tersebut.

Luas permukiman kumuh di Kelurahan Pesisir tersebut sebesar 9,34 Ha yang dapat dikatakan bahwa kelurahan tersebut merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh terluas yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga pentingnya untuk penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Pesisir tersebut untuk segera diatasi agar Kelurahan Pesisir bisa menjadi kawasan yang layak huni. Selain menjadi salah satu permukiman kumuh terluas di Kota Pekanbaru, untuk kondisi jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Pesisir tersebut masih banyak ditemukan yang berlobang maupun rusak sehingga hal tersebut dapat membahayakan bagi pengemudi dan masyarakat yang melewati jalan di Kelurahan Pesisir tersebut. Dari paparan di atas maka penulis ingin Mengevaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Pekanbaru tepatnya pada Kelurahan Pesisir, agar dapat mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan program KOTAKU tersebut di Kelurahan Pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Program KOTAKU merupakan salah satu usaha pemerintah yang bertujuan untuk penanganan permukiman kumuh dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan seperti, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran.

Program KOTAKU dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU tidak menentu karena masih ada yang gagal melaksanakan program tersebut. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri program ini juga sudah terlaksana di beberapa kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya adalah Kelurahan Pesisir namun belum diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari program ini.

Sehingga dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam program KOTAKU di Kelurahan Pesisir?
2. Apakah akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU Kelurahan Pesisir sudah meningkat?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman?

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dari program KOTAKU (kota tanpa kumuh) ,

meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) khususnya di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

1.2.2 Sasaran

Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Pesisir
2. Mengetahui akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanp Kumuh) di Kelurahan Pesisir
3. Mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademis yaitu hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan koleksi data serta referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti sendiri yaitu menambah pengetahuan dan wawasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
3. Bagi pembaca maupun masyarakat umum hendaknya dapat menjadikan bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan suatu kawasan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup studi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi yang mencakup masalah-masalah yang dibahas dalam studi dan ruang lingkup wilayah yang meliputi batasan wilayah yang dijadikan objek studi.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai evaluasi yang terkait dengan indikator program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yaitu realisasi kegiatan infrastruktur seperti bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran.

Penelitian ini juga membahas mengenai akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir dengan indikator bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran.

Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Pesisir melalui indikator-indikator penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman, seperti pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

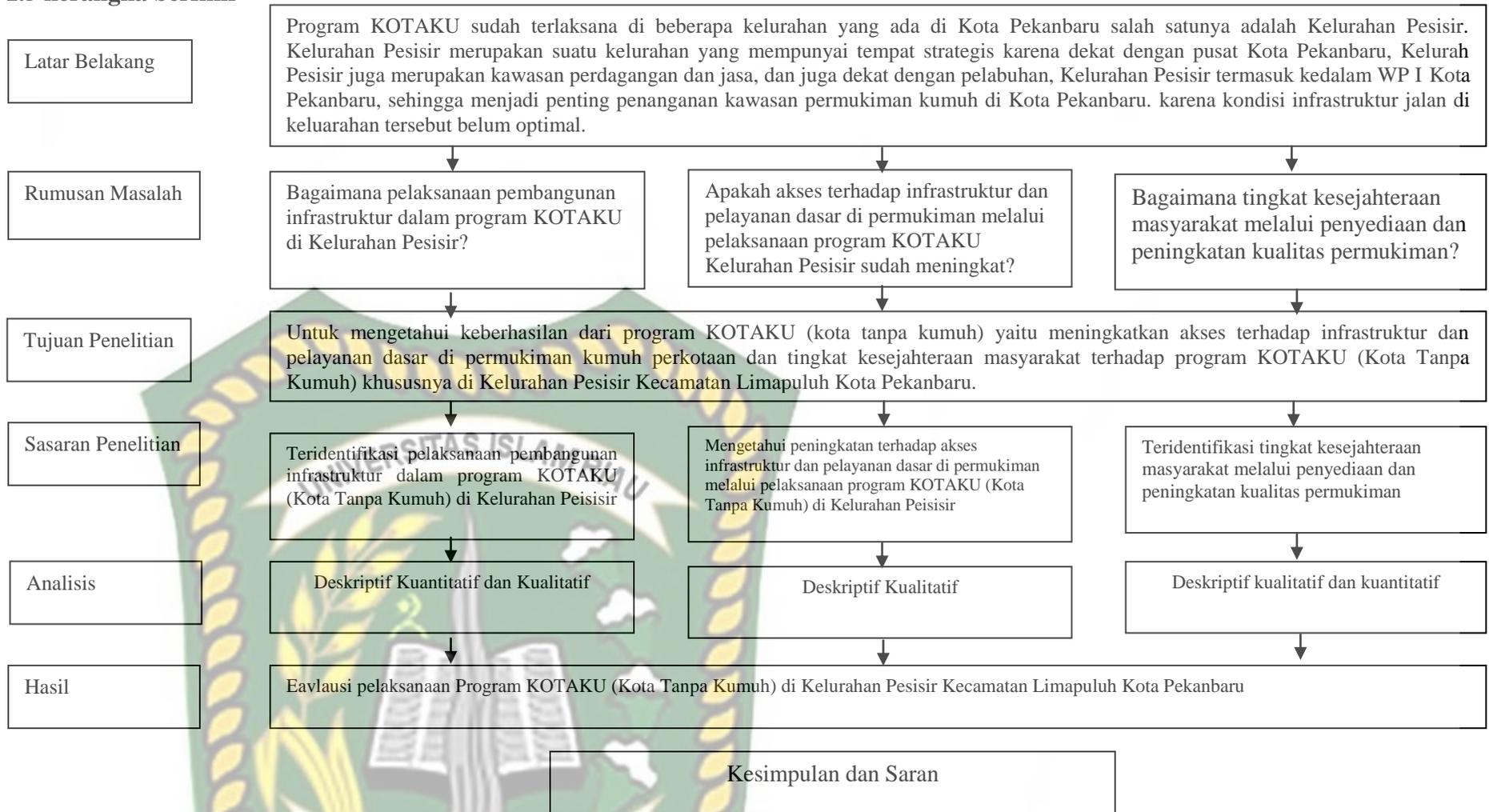
Adapun lingkup wilayah dari penelitian ini meliputi wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

1. Batas Kelurahan Pesisir

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Siak
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Rintis
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Rhu



1.5 kerangka berfikir



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir
Hasil analisis 2019

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas serta untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut agar lebih sistematis dan terperinci, tugas akhir yang diusulkan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian (ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan. Dengan membaca bab ini, diharapkan pembaca mengetahui konsep penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang literatur yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, yang berisikan berbagai bentuk teori yang berkaitan dengan tema yang diangkat antara lain mengenai teori-teori evaluasi, teori-teori pelaksanaan dan juga teori-teori mengenai program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), sintesa teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang cara penyelesaian masalah pada penyusunan tugas akhir, dimana berisi pendekatan penelitian, sampel, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis serta *design survey*.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILYAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum bagaimana Kota Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, dan juga Kelurahan Pesisir serta kependudukannya dan luas permukiman kumuh di daerah tersebut.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dilakukan identifikasi mengenai keberhasilan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMNEDASI

Bab ini akan memberikan kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian. Selain itu juga ada beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga terdapat rekomendasi penelitian dengan judul dan batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Program

2.1.1 Pengertian Evaluasi Program

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1983). Sedangkan menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan obyek dengan menggunakan *instrument* dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. (M. Chabib Thoha, 1990)

Menurut Anderson dalam Erowati (2017), secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Erowati (2017) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2008) memandang bahwa, evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan.

Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2008) mengatakan bahwa, evaluasi merupakan penggambaran proses, mencari dan memberikan informasi

yang berguna untuk para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut Arikunto dan Jabar (2008) satu pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya standar, tolak ukur, atau kriteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan.

Menurut Wirawan (2016) program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Arikunto dalam Erowati (2017) program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum, dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian program secara khusus biasanya dikaitkan dengan evaluasi yang berarti suatu kesatuan atau unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Arikunto (2009) evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan.

2.1.2 Tujuan Evaluasi Program

Menurut Arikunto dan Jabar (2008) tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya.

Menurut Mulyatiningsih dalam Erowati (2017) evaluasi program dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk pengembangan program yang sama di tempat lain.
2. Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

2.1.3 Konsep dan Penerapan Evaluasi

Menurut Dunn dalam Agus (2018), mengemukakan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijaksanaan dan program. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan dan program.

Menurut Dunn dalam Agus (2018), pada umumnya ada tiga cara evaluasi yaitu :

1. Membandingkan fakta atau keadaan yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program.
2. Membandingkan sebagian hasil program dalam kaitannya dengan *input* yang digunakan, misalnya kemajuan suatu daerah yang telah melaksanakannya

suatu program pembangunan daerah dengan daerah lain yang akan melaksanakan program sejenis.

3. Membandingkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu di tempat yang sama sebagai hasil pelaksanaan suatu program tertentu.

Jones dalam Agus (2008), mengkhususkan evaluasi untuk melihat manfaat program dan proses pemerintahan, namun untuk suatu proyek maka evaluasi dan pemantauan merupakan suatu alat kontrol secara berkala dengan konsisten yang dalam operasional dapat menunjukkan besarnya nilai manfaat serta perubahannya dari suatu aktifitas perubahannya. Dengan demikian hasil pelaksanaan suatu program dapat dievaluasi dengan melibatkan masyarakat pengguna (mendukung atau tidak mendukung) untuk mendapatkan legitimasi (pengukuran) atas tingkat pengguna dari hasil pelaksanaan program/proyek.

Beberapa konsep dalam Evaluasi menurut Tayibnaps (2000) dalam Agus (2018), adalah sebagai berikut :

1. Evalausi Formatif dan Sumatif

Scnven dalam Tayibnaps (2000) evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program. Evaluasi formatif harus mengarah kepada keputusan tentang perkembangan program termasuk perbaikan, revisi, dan semacam itu sedangkan evaluasi sumatif mengarah kepada keputusan tentang kelanjutan program, berhenti atau program diteruskan, pengadopsian dan selanjutnya.

2. Evaluasi *Internal* dan Evaluasi *Eksternal*

Evaluasi *internal* dan evaluasi *eksternal* yang dilakukan oleh evaluator dari dalam sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dari dalam program. Pada evaluasi internal evaluator tentu mengetahui lebih banyak tentang programnya dari pada orang luar, tetapi sering juga kurang mengetahui atau tidak mengetahui hal-hal penting dan kritis sedangkan evaluasi *eksternal*, *evaluator* seringkali menangkap hal-hal penting yang tidak diketahui secara *internal*.

Evaluasi suatu program merupakan suatu penelitian terhadap aplikasi berupa skala nilai efektifitas suatu kebijaksanaan dan program. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan fakta atau keadaan yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program. Berdasarkan Mayori (2002) dijelaskan masing-masing pengukuran efektifitas tersebut, yaitu :

A. Indikator *Input*

Mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses program maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia, informasi, peraturan/kebijakan yang digunakan untuk kegiatan.

B. Indikator *Output*

Mengukur *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.

C. Indikator *Outcome*

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* (efek langsung) pada jangka pendek dan menengah. Informasi yang dibutuhkan untuk mengukur *outcome* sering kali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh.

D. Indikator *Benefit*

Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcome*. Manfaat tersebut pada umumnya tidak segera tampak. Indikator *benefit* menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila *output* dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

E. Indikator *Impact*

Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari *benefit* yang diperoleh. Seperti halnya dengan indikator *benefit*, indikator *impact* juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Berkaitan dengan evaluasi kegiatan program/proyek yang berorientasi pada pembangunan masyarakat (*community development*), menurut Setiawan (2003) ada tiga kriteria evaluasi yang dapat dilakukan yaitu :

a. *Sustainability*/keberlanjutan/kelangsungan program/proyek.

Pada aspek ini evaluator dapat mengkaji: (1) apakah proyek dilanjutkan oleh komunitas (2) apakah ada *multiplier effect* dari proyek tersebut (3) apakah telah terjadi *transfer of knowledge/technology* dan (4) apakah telah terjadi pengembangan kapasitas komunitas (*capacity building*).

b. *Replicability*/kemungkinan dikembangkan di tempat (*setting*) lain.

Pada aspek ini *evaluator* dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut: (1) apa situasi-situasi spesifik kasus (2) apa situasi/kondisi umum kasus dan (3) prasarat dasar apa agar dapat dikembangkan ditempat lain.

- c. Dampak pemberdayaan (*empowerment*) secara keseluruhan.

Dalam hal ini meliputi: (1) siapa yang diberdayakan; (2) dalam aspek apa diberdayakan, dan (3) *intensity* yaitu tingkat kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan program/proyek atau diwujudkan dalam bentuk kemitraan.

2.1.4 Ciri-ciri dan Persyaratan Evaluasi Program

Menurut Arikunto dan Jabar (2009) Evaluasi Program memiliki ciri-ciri dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
- b. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berfikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi.
- c. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program.
- d. Menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan.
- e. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur.

- f. Agar informasi dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.
- g. Standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan
- h. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara cepat.

2.1.5 Model-model Evaluasi Program

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2009), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*

Goal Oriented Evaluation Model ini dikembangkan oleh Tyler. Dalam model ini, seorang *evaluator* secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang berkelanjutan ini menilai tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas dari temuan yang telah dicapai oleh sebuah program.

2. *Goal Free Evaluation Model*

Goal Free Evaluation Model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven. Dalam *Goal Free Evaluation*, Scriven mengemukakan bahwa dalam melakukan evaluasi program *evaluator* tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan- penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal

yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal *negative* (yang sebetulnya memang tidak diharapkan)

3. *Formatif Sumatif Evaluation Model*,

Formatif Sumatif Evaluation Model dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek, yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).

4. *Countenance Evaluation Model*

Model ini dikembangkan oleh Stake model yang dikembangkan oleh Stake dan Fernades ini menekankan atau memiliki dua kelengkapan utama pada (a) deskripsi (*description*) dan (b) pertimbangan (*judgement*), serta terbagi menjadi 3 tahapan dalam evaluasi program yaitu anteseden yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan sebagai proses dan keluaran yang mengacu pada *output* dan *outcome*.

5. CSE-UCLA Evaluation Model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahapan evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Sementara itu, menurut Fernandes (1984) dalam model CSE-UCLA ini juga dapat dibagi ke dalam empat tahapan evaluasi, yaitu: (a) *needs assessment* (b) *program planning* (c) *formative evaluation* dan (d) *sumatife evaluation*.

6. CIPP Evaluation Model

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di *Ohio State University*. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata ,yaitu :

Context Evaluation : Evaluasi terhadap konteks

Input Evaluation : Evaluasi terhadap masukan

Process Evaluation : Evaluasi terhadap proses

Product Evaluation : Evaluasi terhadap hasil

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP sebagai model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

7. Discrepancy Model

Kata *discrepancy* adalah istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan”. Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan didalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh *evaluator* mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

Khusus untuk model yang dikembangkan oleh Malcom Provus, menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah dicapai.

2.2 Implementasi/Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman dalam Anggraini (2016)

Van Meter dan van Hornyang dalam Akib (2010) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat dilihat dari 2 sisi yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah suatu cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan-pilihan objektif untuk kehidupan pribadinya. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat (Badrudin dalam Purba 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin dalam Purba 2016).

Untuk memantau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas mengambil informasi keadaan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan. Dari informasi tersebut terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Delapan indikator keluarga sejahtera menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah:

a. Pendapatan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Sajogyo (1977) menyatakan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi akan memberi peluang yang lebih besar bagi rumah tangga untuk memilih pangan yang lebih baik dalam jumlah maupun mutu gizinya. Pada sisi lain, rendahnya pendapatan akan menyebabkan orang tidak mampu membeli kebutuhan pangan serta memilih pangan yang bermutu gizi kurang serta tidak beragam.

b. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase

pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan penduduk.

c. Keadaan tempat tinggal

Adapun Kriteria tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai.

d. Fasilitas tempat tinggal

Adapun Fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC dan jarak WC dari rumah.

e. Kesehatan anggota keluarga

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, adapun pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik sudah dibentuk Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perundang-undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat dan lengkap setiap aspek kesehatan. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi pada modal manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang bersamaan, pelayanan-

pelayanan tersebut secara langsung mampu memuaskan konsumsi atas kebutuhan pokok.

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Adapun kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kemudahan yang terdiri dari 6 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, dan alat kontrasepsi.

g. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Adapun Kriteria kemudahan yang dimaksud memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan.

h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Adapun kemudahan mendapatkan transportasi yang dimaksud adalah kemudahan yang terdiri atas 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan. Indikator keluarga sejahtera menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 diatas kemudian diringkas dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Indikator Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator	Kriteria	Skor
1	Pendapatan	Rendah (<Rp.1.500.000)	1
		Sedang (Rp.1.500.000-Rp.2.500.000)	2
		Tinggi (>Rp.2.500.000)	3
2	Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga	Rendah (<Rp. 1.000.000)	1
		Sedang (Rp.1.000.000-Rp.5.000.000)	2
		Tinggi (>Rp.5.000.000)	3
3	Keadaan tempat tinggal	Non permanen	1
		Semi permanen	2
		Permanen	3
4	Fasilitas tempat tinggal	Kurang	1
		Cukup	2
		Lengkap	3
5	Kesehatan anggota	Kurang	1
		Cukup	2

No	Indikator	Kriteria	Skor
	keluarga	Bagus	3
6	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan	Sulit	1
		Cukup	2
		Mudah	3
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Sulit	1
		Cukup	2
		Mudah	3
8	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	Sulit	1
		Cukup	2
		Mudah	3

Sumber : Indikator Keluarga Sejahtera BPS Tahun 2005 dalam Sugiharto2007

2.4 Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily 2000). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

Menurut Adisasmita dalam Apriliana (2018) Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan di dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat. Sedangkan menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengenai masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Sumardi dalam Andreeyan (2014), mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2.5 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

2.5.1 Pengertian Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Karena agama Islam mengajarkan betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan sebagaimana dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (رواه التيرمدى: 2723)

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. (H.R. at –Tirmizi: 2723)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tersebut sangat jelas perintah Allah SWT untuk kita menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal karena sejatinya Allah menyukai kebersihan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kotadi 34 provinsi. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Menurut Greene (2003) mengatakan bahwa *Under the logic of event-oriented development, the visibility of poverty becomes paramount in renewal schemes, and preparations often involve removing the poor from high-profile areas surrounding event venues, without significant attention to long-term solutions to slum problems.* KOTAKU diharapkan menjadi *platform* kolaborasi yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh. (Pedoman Umum program KOTAKU)

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut :

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman.
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi.
 - a. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.

Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

1. Jalan Lingkungan
2. Penyediaan Air Minum
3. Drainase Lingkungan
4. Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi
5. Pengelolaan Persampahan
6. Ruang Terbuka Publik
7. Pengamanan Kebakaran

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.5.2 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Indikator tersebut adalah :

1. Bangunan Gedung
 - a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk.
 - b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.
 - c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
 - a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman.
 - b. Lebar jalan yang tidak memadai.
 - c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3. Penyediaan Air Minum
 - a. Ketidaktersediaan akses air minum
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
 - c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
4. Drainase Lingkungan
 - a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan.
 - b. Menimbulkan bau.
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.

5. Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi
 - a. Ketidakterediaan sistem pengelolaan air limbah.
 - b. Ketidakterediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Tercemarnya lingkungan sekitar.
6. Pengelolaan Persampahan
 - a. Ketidakterediaan sistem pengelolaan persampahan.
 - b. Ketidakterediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
7. Ruang Terbuka Publik
 - a. Ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif.
 - b. Ketidakterediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai.
 - c. Ketidakterediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
8. Pengamanan Kebakaran
 - a. Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).
 - b. Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP).

2.5.3 Strategi dan Prinsip

1. Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

2. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
- d. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
- e. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
- f. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota.
- g. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan.
- h. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci, dan
- i. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

3. Prinsip

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah :

- a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor

maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program). Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh ditingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.
- d. Partisipatif pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan ditingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.
- e. Kreatif dan inovatif prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam

- penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.
- f. Pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.
 - g. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).
 - h. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
 - i. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

2.6 Infrastruktur KOTAKU

Infrastruktur merupakan salah satu yang sangat penting di dalam pembangunan, khususnya di kawasan perkotaan. Infrastruktur yang mencukupi dan berkualitas akan dapat untuk meningkatkan efisiensi berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, infrastruktur berkualitas juga akan dapat menyumbang terwujudnya kualitas kesehatan

lingkungan. Infrastruktur adalah sangat vital di dalam mewujudkan kesehatan dan kemakmuran negara (Parkin dan Sharma, dalam dinata 2013)

Menurut Grigg dalam Cakrawijaya (2014) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Menurut Kementrian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh yaitu : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengaman bahaya kebakaran, dan ruang terbuka publik.

1. Bangunan Gedung

Menurut Kepmen Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengaman terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.

2. Jalan Lingkungan

Menurut Joyopuspito dalam Djunaidi (2014), jalan lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan

perumahan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, jalan lingkungan terbagi lagi atas dua jenis, yaitu jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Pada Pasal 10 Ayat 4 peraturan tersebut disebutkan bahwa jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Sedangkan pada Pasal 11 Ayat 4 selanjutnya disebutkan bahwa jalan lingkungan sekunder menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

3. Penyediaan Air Minum/Air Bersih

Menurut Radianta Triatmadja dalam Andrew (2018) air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

4. Drainase Lingkungan

Menurut Suripin dalam Apriliana (2018) drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Fungsi drainase adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
- b. Sebagai pengendali air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air/banjir.
- c. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.

- d. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
- e. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

5. Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi

Menurut Apriliana (2018) sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

6. Pengelolaan Persampahan

Menurut Tchobanoglous *et.al* dalam Fadhilah (2011) pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan masyarakat luas. Dengan demikian pengelolaan sampah merupakan suatu cara untuk menyikapi sampah agar dapat memberikan suatu manfaat dan tidak merusak lingkungan.

7. Pengamanan Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, maka suatu bangunan harus memiliki sistem proteksi kebakaran, baik

itu aktif maupun pasif, dilengkapi dengan kelengkapan tapak dan sarana penyelamatan.

8. Ruang Terbuka Publik

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menyatakan bahwa RTH merupakan tempat tumbuh tanaman baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang atau mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi. Manfaat yang di hasilkan RTH kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

2.7 Kaitan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dengan Perencanaan Wilayah dan Kota

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia dengan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman menjelaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Infrastruktur menurut Grigg dan Fontane dalam Pohan (2013) merupakan sistem rekayasa dan manajemen, infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan penduduk. Manusia dan aktivitasnya ibarat seperti *contain/isi* yang memerlukan sebuah wadah atau *container* yang disebut juga ruang. Dengan demikian infrastruktur berperan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang perkotaan.

2.8 Sintesa Teori

Berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kajian teoritis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Berikut dapat dilihat sintesa teori pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Sintesa Teori

Adapun sintesa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Teori	Sumber	Keterangan
1	Pengertian Evaluasi	John M. Echols dan Hasan Shadily, 1983	Evaluasi berasal dari bahasa Inggris <i>evaluation</i> yang berarti penilaian atau penaksiran
		Arikunto dan Jabar 2009	Evaluasi adalah adanya standar, tolak ukur, atau kriteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan.
2	Pengertian Program	Arikunto dalam Erowati (2017)	Program merupakan suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisikan kebijakan serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
		Isaac dan Michael dalam Erowati (2017)	Program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya
3	Pengertian Program Evaluasi	Suharsimi Arikunto, 2009	Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan
4	Tujuan Program Evaluasi	Arikunto dan Jabar 2008	Tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena <i>evaluator</i> program ini mengetahui bagian mana dari komponen dan sub komponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya.
5	Pengertian Implementasi/ Pelaksanaan	Nurdin Usman dalam Hadiyanti (2013)	Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.

No	Teori	Sumber	Keterangan
7	Pengertian Program KOTAKU	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum program KOTAKU	Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia
8	Tujuan Program KOTAKU	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum program KOTAKU	Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, seperti : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Ruang Terbuka Publik dan Pengamanan Kebakaran.
9	Kaitan Program KOTAKU dengan Perencanaan Wilayah dan Kota	UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Dan Grigg dan Fontane (2000)	Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia dengan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Infrastruktur merupakan Sistem rekayasa dan manajemen, infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan penduduk. Manusia dan aktivitasnya ibarat seperti <i>contain/isi</i> yang memerlukan sebuah wadah atau <i>container</i> yang disebut juga ruang. Dengan demikian infrastruktur berperan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang perkotaan.

Sumber : Hasil Analisis 2018

2.9 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan syarat untuk keabsahan karya tulis ilmiah yang dapat ditinjau pada ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan penelitian lain yang sejenis. Adapun keaslian penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui beberapa kajian hasil studi yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :



Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Zulyanti	Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai Model Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung	Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung	Metode kualitatif.	Hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi program KOTAKU telah melalui 4 tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dari tiap-tiap tahap pelaksanaan program KOTAKU tidak seluruh masyarakat ikut terlibat di dalamnya, masih terlalu dominan peran pemerintah dalam segala bentuk pelaksanaan yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan berbasis masyarakat.
2	Sahria Apriliana	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)	Kelurahan Teritip Kota Balikpapan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan sudah baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan, hanya saja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan belum maksimal hal ini dapat dilihat dari pada perencanaan hanya beberapa saja warga yang terlibat, dalam pelaksanaannya belum semua warga ikut dalam kegiatan pelaksanaannya karena kesibukan masyarakat akan pekerjaan/profesinya, dan tahapan evaluasi belum adanya peningkatan secara signifikan terhadap manfaat drainase itu sendiri. Faktor penghambat meliputi masih kurangnya kesadaran/kemauan masyarakat itu sendiri, kesibukan masyarakat terhadap pekerjaannya yang menjadikan ketidakhadiran masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, kurangnya kepercayaan masyarakat tentang penyelenggaraan program Kotaku, seperti penyelewengan dana untuk menyelenggarakan program tersebut,

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dipungkiri akan mengharapkan imbalan, kurang pahami masyarakat akan pembangunan yang baik dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri, dan fasilitas yang kurang memadai.
3	Sulista Yuniati	Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan pengurangan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo terutama yang masuk dalam SK Bupati belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari empat indikator pengukuran peningkatan kualitas permukiman melalui evaluasi program dengan model CIPP yaitu dimensi konteks, input, proses dan produk. Dari keempat dimensi tersebut, penanganan permukiman kumuh sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran program dengan intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh para aktor. Akan tetapi, dalam perhitungan pengurangan kumuh masih menjadi kendala karena belum mempunyai acuan resmi dalam perhitungannya dan capaian penanganan permukiman kumuh sampai tahun 2017 hanya seluas 9,79 hektar. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu faktor anggaran, lahan dan pola pikir masyarakat. Implementasi program juga di dukung oleh swadaya masyarakat yang tinggi sebagai pelaksana dan kolaborasi antar aktor yang terlibat.
4	Sri Yuliani	Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta	Kelurahan Semanggi Kota Surakarta	Deskriptif Kualitatif	Hasilnya adalah kolaborasi belum diimplementasikan dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi karena hanya beberapa stakeholder yang terlibat dalam setiap tahap. Sejauh ini ada pula rintangan kerjasama dalam bentuk sumber daya manusia dan kendala komunikasi antara masing-masing stakeholder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi belum efektif dan memerlukan pemerataan persepsi tentang bentuk sebenarnya dan konsep kolaborasi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Arrum Cahaya Hasanah	Pertisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Medan Johor Kota Medan	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	kualitatif deskriptif	Kecamatan Medan Johor adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan. Di Kecamatan Medan Johor ini banyak terdapat perumahan – perumahan kelas menengah dan mewah, dan daerah ini sangat potensial bagi para investor yang bergerak dibidang Real Estate, serta sangat potensial dalam bidang agrobisnis dan pendidikan. Melihat banyaknya lingkungan kumuh di Kecamatan ini, maka Kecamatan Medan Johor ini termasuk dalam kategori daerah kumuh sedang. Namun, Kecamatan ini sangat berpotensi untuk berkembang dan tidak menjadi daerah kumuh lagi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya potensi wilayah yang dimiliki.

Sumber : Hasil Analisis 2018



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari kata “*Methodos*” yang terdiri dari kata “*Metha*” yaitu melewati, menempuh atau melalui dan kata “*hodos*” yang berarti cara atau jalan. Metode artinya cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh. Sedangkan menurut istilah metode ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan.

Metodologi secara bahasa berasal bahasa Yunani yaitu “*methodos*” dan “*logos*” berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Jadi metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan metodologi penelitian terbagi dua yaitu : pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deduktif.

Menurut Yamin dalam Amasse 2015 Pendekatan deduktif ini menjelaskan teoritis kebentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

3.2 Lokasi dalam penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pekanbaru yaitu tepatnya di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru-Riau.

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini pada proses pengambilan data antara lain :

1. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan data dari hasil pengamatan.
2. Alat tulis (pena, pensil, buku dan sebagainya) digunakan untuk mencatat dan menulis data hasil dari pengamatan di lapangan.
3. Komputer/Laptop digunakan untuk mengolah data yang diperlukan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan mempengaruhi hasil dari penelitian ini karena dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan metode pengolahan data secara akurat. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Jenis data tersebut meliputi kondisi infrastruktur yang menjadi indikator dari program KOTAKU seperti, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengaman kebakaran, dan ruang terbuka publik.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber lain secara tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dan dikumpulkan oleh instansi terkait antara lain Dinas PUPR, Konsultan KOTAKU, Perpustakaan Fakultas Teknik, Badan Pusat Statistik (BPS), Koran dan lain-lain. Pengumpulan data dari instansi-instansi terkait di

perlu guna mendukung pembahasan studi yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian baik secara nasional, catatan-catatan penunjang, literatur, buku-buku di perpustakaan, dokumentasi, arsip-arsip penting pemerintahan dan keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembuatan laporan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Observasi (Pengamatan), yaitu cara pengumpulan data dengan melihat langsung kelapangan atau lokasi penelitian. Penulis melakukan pengamatan langsung atau melakukan observasi terhadap pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu seperti, berbentuk tulisan, foto-foto, atau karya-karya monumental dari seseorang.
3. Telaah pustaka, yaitu pengumpulan data informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur buku-buku yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Seluruh data yang telah diperoleh melalui cara ini merupakan data sekunder yang disajikan dengan cara mengutip dan mengungkapkan kembali teori-teori yang ada.
4. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

wawancara tertutup dan teratur kepada instansi terkait yaitu konsultan pelaksana program KOTAKU, dengan demikian responden hanya akan menjawab sesuai yang telah ditentukan pewawancara.

5. Kuisisioner/Angket

Merupakan pertanyaan – pertanyaan atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung ataupun secara tidak langsung. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner tersebut ialah bersifat tertutup dengan menggunakan pilihan jawaban (*option*) yang ditentukan oleh penanya. Kuisisioner yang telah diberikan kepada responden/masyarakat di Kelurahan Pesisir.

3.6 Waktu Pengambilan Data Primer

Untuk lebih jelasnya waktu pengambilan data primer terdapat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Pengambilan Data Primer

No	Hari	Tanggal	Waktu	Jam
1	Selasa	17 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00
2	Rabu	18 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00
3	Kamis	19 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00
4	Jumat	20 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00
5	Sabtu	21 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00
6	Senin	23 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00
7	Selasa	24 September 2019	Pagi – Sore	09.00 – 16.00

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Teridentifikasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir

Analisis data dalam permasalahan ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam program KOTAKU di Kelurahan Pesisir yang telah direalisasikan pada tahun 2017-2018, dilakukan melalui perbandingan dokumen KOTAKU di Kelurahan Pesisir dengan pembangunan yang telah direalisasikan dengan melakukan persentase untuk setiap indikator dari program KOTAKU dengan rumus :

$$\text{persentase (\%)} = \frac{\text{Skor yang di Observasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100$$

Dari hasil persentase yang telah diperoleh kemudian disusun kedalam tabel agar pembacaan hasil penelitian menjadi lebih mudah. Setelah dilakukan Persentase untuk setiap pelaksanaan indikator program KOTAKU barulah dapat ditentukan *range*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir. untuk menentukan kriteria *range* dilakukan dengan cara :

1. Menentukan persentase skor ideal (Skor Maksimum) = 100%
2. Menentukan persentase skor terendah (Skor Minimum) = 0%
3. Menentukan *range* = 100-0 = 100
4. Menentukan *interval* yang dikehendaki = 4 (berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil)
5. Menentukan lebar *interval* (100/4= 25)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka *range* dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU dapat ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Range Penilaian Keberhasilan Program

Range	Keterangan
76% - 100%	Berhasil
51% - 75%	Cukup Berhasil
26% - 50%	Kurang Berhasil
0% - 25%	Tidak Berhasil

Sumber: Fauzan 2011

Sedangkan kualitatif digunakan untuk mendukung metode kuantitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan pengolahan data kuantitatif dan data-data hasil kegiatan observasi lapangan di Kelurahan Pesisir terhadap pelaksanaan Program KOTAKU di kelurahan tersebut.

3.7.2 Mengetahui Peningkatan terhadap Akses Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Melalui Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir

Analisis data dalam permasalahan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif Menurut Whitney dalam Nazir (2009), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Lebih lanjut Whitney menjelaskan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode ini dapat mengungkapkan peristiwa riil di lapangan bahkan mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan terhadap akses infrastruktur dan pelayanan dasar sebelum dan sesudah di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir dan melakukan persentase terhadap peningkatan yang terjadi dengan menggunakan rumus :

$$\text{persentase (\%)} = \frac{\text{Skor yang di Observasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100$$

Penjelasan mengenai peningkatan akan dilakukan untuk setiap indikator pada infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air

limbah, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran.

3.7.3 Teridentifikasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Analisis data dalam permasalahan ini menggunakan analisis deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman dengan metode menyebar kuisisioner yang mana kuisisioner tersebut berisi tentang variabel-variabel/indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat diantaranya pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis yaitu dengan melakukan rekapitulasi hasil kuisisioner dengan menggunakan penilaian berupa skor sehingga dapat ditentukan hasil indikator keluarga sejahtera. Untuk menentukan indikator keluarga sejahtera masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penilaian Indikator Keluarga Sejahtera

Kategori	Range
Tinggi	20 – 24
Sedang	14 – 19
Rendah	8 – 13

Sumber : BPS dalam Sugiharto 2007

3.8 Populasi dan Sampel

3.8.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012) Populasi merupakan keseluruhan yang menjadi sumber data dan informasi mengenai suatu yang ada hubungannya dengan penelitian tentang data yang diperlukan. Dalam memecahkan masalah, langkah yang penting adalah menentukan populasi menjadi sumber data dan sekaligus sebagai objek penelitian. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari peneliti untuk ditarik kesimpulannya.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama mengenai kesejahteraan masyarakat terhadap pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir, dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk disampaikan kepada responden yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Kelurahan Pesisir

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	3947
2	Perempuan	4824
	Jumlah	8771

Sumber : Kecamatan Limapuluh dalam Angka 2018

3.8.2 Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu (Sugiyono, 2012). Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya.

Teknik untuk pengambilan sampel digunakan teknik dengan menggunakan *Random Sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. Dalam *Random Sampling* data tingkatan tinggi, rendah, sedang/baik, jenjang pendidikan kemudian sampel diambil dari tiap tingkatan tersebut. *Random Sampling* sangat tepat digunakan kalau elemen – elemen yang diselidiki mempunyai nilai – nilai karakteristik yang *heterogen* (bervariasi). Secara umum, jumlah ukuran sampel yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus Slovin dalam Sevilla, 1993 sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diininkan adalah 10%

Berdasarkan rumus di atas, ukuran sampel yang dianggap sudah dapat mewakili populasi dengan menggunakan derajat kepercayaan 10%, tingkat ketelitian kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia (Sugiyono, 2016), maka jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{8771}{1 + 8771 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{8771}{1 + 8771 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{8771}{1 + 87,71}$$

$$n = \frac{8771}{88,71}$$

$$n = 98,8 \approx 99 \text{ KK}$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Slovin didapat jumlah sampelnya 99 KK di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

3.9 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah terhadap suatu masalah yang berdasarkan pada data terpercaya dan bertujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu atau beberapa masalah yang diteliti.

Dari pengertian di atas, bisa diartikan bahwa variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan ketika proses penelitian itu sendiri. Berikut Tabel 3.2 desain survei yang di perlukan dalam penelitian ini :

Tabel 3.5 Desain Survei

Sasaran	Variabel	Indikator	Data yang di Butuhkan	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
Teridentifikasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Peisisir	Infrastruktur	1. Bangunan Gedung, 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan Air Minum 4. Drainase Lingkungan, 5. Pengelolaan Air Limbah 6. Pengelolaan Persampahan 7. Ruang Terbuka Publik 8. Pengamanan Kebakaran	1. Dokumen Terkait Perencanaan Program KOTAKU 2. Gambar pelaksanaan program KOTAKU	1. Dinas PUPR 2. Konsultan KOTAKU 3. Masyarakat Kelurahan Pesisir 4. Survey Lapangan	Survei Sekunder dan Survei Primer (Hasil dari survei lapangan dengan wawancara dan observasi lapangan)	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	Teridentifikasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari Program KOTAKU di kelurahan Pesisir
Mengetahui peningkatan terhadap akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Peisisir	Infrastruktur	1. Bangunan Gedung, 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan Air Minum 4. Drainase Lingkungan 5. Pengelolaan Air Limbah 6. Pengelolaan Persampahan 7. Ruang Terbuka Publik 8. Pengamanan Kebakaran	1. Dokumen/ Bahan paparan terkait pelaksanaan program KOTAKU	1. Dinas PUPR 2. Konsultan KOTAKU 3. Masyarakat Kelurahan Pesisir	Survei Sekunder dan Survei Primer (Hasil dari survei lapangan dengan wawancara dan observasi lapangan)	Deskriptif Kualitatif	Mengetahui peningkatan terhadap akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir

Sasaran	Variabel	Indikator	Data yang di Butuhkan	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
Teridentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman	Kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. konsumsi atau pengeluaran rumah tangga 3. keadaan tempat tinggal 4. fasilitas tempat tinggal 5. kesehatan anggota keluarga 6. kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 7. kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan 8. kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi. 	Hasil penyebaran kuisioner	1. Masyarakat Kelurahan Pesisir	Menyebarkan kuisioner kepada masyarakat Kelurahan Pesisir	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Teridentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman

Sumber: Hasil Analisis 2018



BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Pekanbaru terletak dibagian tengah Provinsi Riau, dengan letak geografis antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ lintang utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 september 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 446,50$ km², terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Provinsi Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 83 kelurahan. Secara administratif Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan :

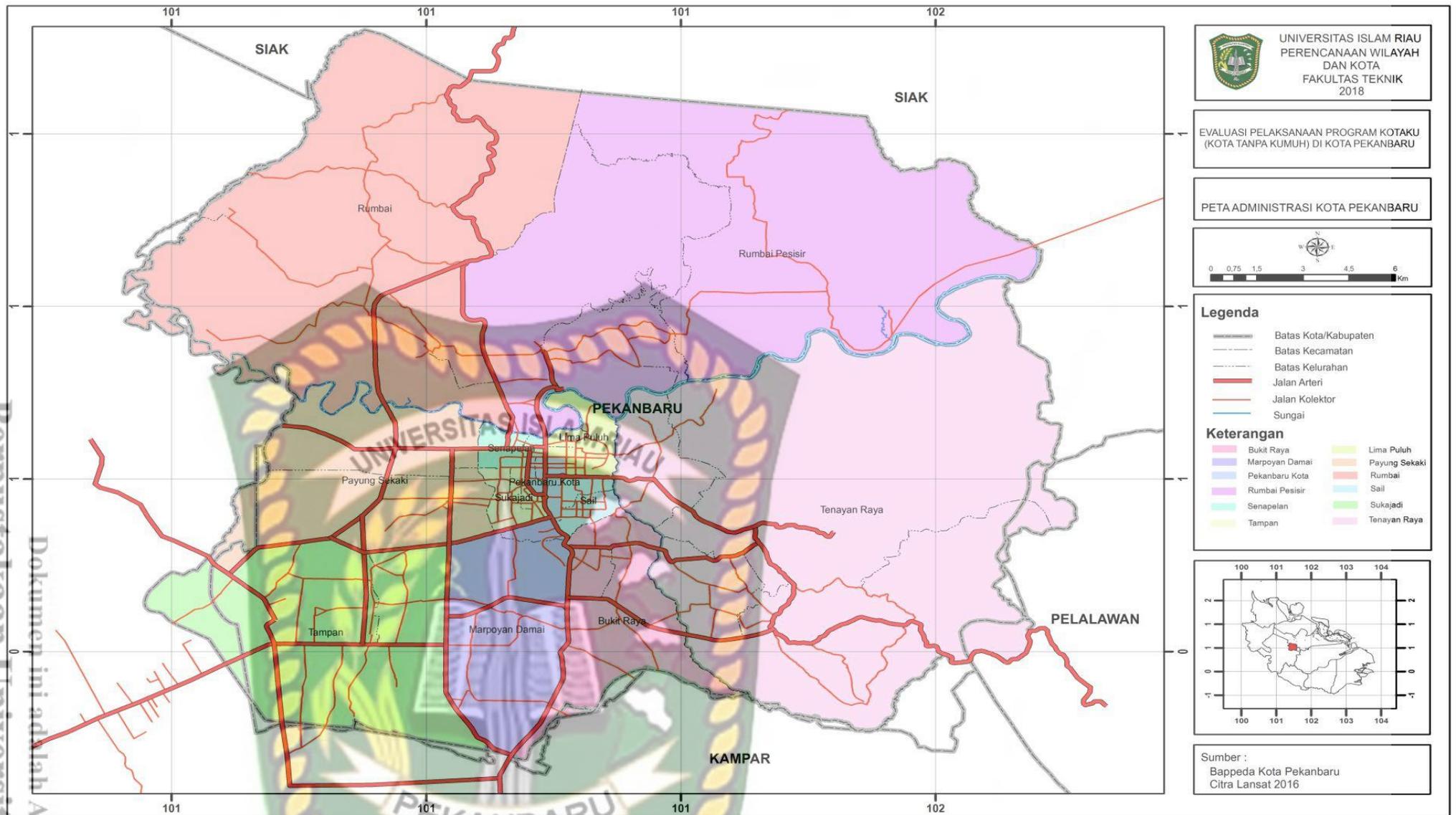
- a. Sebalah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan, dengan luas 632,26 Km². Luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukitraya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,7
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Limapuluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
	Jumlah	632,26	100

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka 2018



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Pekanbaru

4.1.2 Kependudukan Kota Pekanbaru

Kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali oleh berbagai faktor seperti tingginya tingkat fertilitas penduduk dan banyaknya kaum *urban* yang datang tiap tahun. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar 2,49 persen lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,24%. berikut Tabel jumlah penduduk tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tampan	59,81	285.932	4.781
2	Payung Sekaki	43,24	90.902	2.102
3	Bukit Raya	22,05	103.722	4.704
4	Marpoyan Damai	29,74	131.362	4.417
5	Tenayan Raya	171,27	162.530	949
6	Lima Puluh	4,04	42.469	10.512
7	Sail	3,26	22.015	6.753
8	Pekanbaru Kota	2,26	25.719	11.380
9	Sukajadi	3,76	48.544	12.911
10	Senapelan	6,65	37.459	5.633
11	Rumbai	128,85	67.570	524
12	Rumbai Pesisir	157,33	72.864	463
	Jumlah	632,26	1.091.088	1.726

Sumber: Kota Pekanbaru dalam angka, 2018

Jumlah rumah tangga di Kota Pekanbaru menurut data tahun 2017 adalah sebesar 259.849 rumah tangga dengan total penduduk 1.091.088 Jiwa, sehingga

dapat ditarik rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga adalah 4,19 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga
1	Tampan	285.932	70.468	4.06
2.	Payung sekaki	90.902	21.254	4,28
3	Bukit raya	103.722	24.729	4,19
4	Marpoyan	131.362	31.375	4,19
5.	Tenayan raya	162.530	37.375	4,32
6.	Lima puluh	42.469	9.844	4,31
7.	Sail	22.015	5.595	3,93
8.	Pekanbaru kota	25.719	5.839	4,40
9.	Sukajadi	48.544	11.887	4,08
10	Senapelan	37.459	8.367	4,48
11.	Rumbai	67.570	15.667	4,31
12.	Rumbai pesisir	72.864	17.168	4,24
	Total	1.091.088	259.849	4,19

Sumber : Kota Pekanbaru dalam Angka 2018

4.1.3 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru

Berdasarkan SK Walikota No. 878 Tahun 2017 tentang perubahan SK Walikota No. 151 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru yang pada awalnya 7 kawasan menjadi 8 kawasan, maka terdapat 19 kelurahan yang termasuk kedalam deliniasi kawasan permukiman kumuh yang tergabung dalam 8 kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel 4.4
Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota
Nomor 878 Tahun 2017

No	Kawasan	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Sungai sago	Kampung Dalam	Senapelan	24,23
		Sago	Senapelan	
		Kota baru	Pekanbaru kota	
		Sukaramai	Pekanbaru kota	
		Tanah Datar	Pekanbaru Kota	
2	Kota Lama	Kampung Bandar	Senapelan	8,18
		Kampung Baru	Senapelan	
		Tampian	Payung Sekaki	
3	Pesisir	Pesisir	Limapuluh	23,04
		Pesisir	Limapuluh	
		Tanjung Rhu	Limapuluh	
4	Meranti	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	21,32
		Sri Meranti	Rumbai	
5	Lembah Damai	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	13,00
6	Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Rumbai Pesisir	14,60
		Limbangan	Rumbai Pesisir	
		Limbangan Baru	Rumbai Pesisir	
7	Padang Terubuk	Padang Terubuk	Padang Terubuk	5,30
8	Sumahilang	Sumahilang	Pekanbaru Kota	3,10
	Total Luas Deliniasi Kumuh Kota pekanbaru			113,56

Sumber : *Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pesisir 2017*

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Limapuluh

Kecamatan Limapuluh merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari empat (4) kelurahan, 30 RW dan 121 RT. Luas wilayah Kecamatan Limapuluh adalah 4,04 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Rintis : 0,68 km²
- b. Kelurahan Sekip : 0,82 km²
- c. Kelurahan Tanjung Rhu : 1,68 km²
- d. Kelurahan Pesisir : 0,86 km²

Batas- batas wilayah Kecamatan Limapuluh adalah :

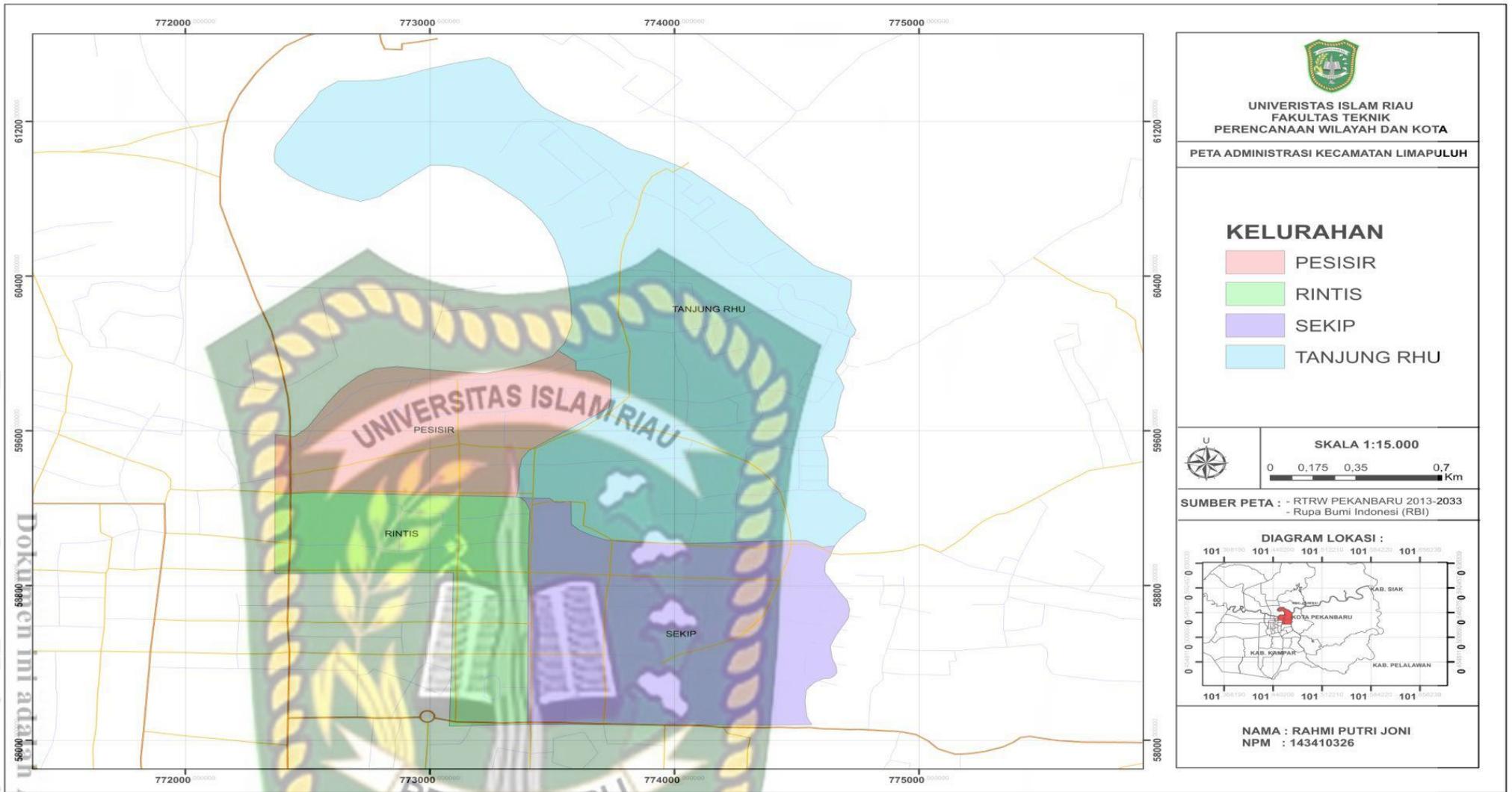
- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
- c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sail

Jumlah penduduk Kecamatan Limapuluh mencapai 41.450 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen dari tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai 10.260 jiwa/km². Berikut adalah Tabel jumlah penduduk Kelurahan Pesisir menurut jenis kelamin di Kecamatan Limapuluh pada tahun 2017 yaitu :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Limapuluh 2017 (jiwa)

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Rintis	4338	4549	8887
2	Sekip	4625	5169	9794
3	Tanjung Rhu	7716	6268	13998
4	Pesisir	3947	4824	8771
	Jumlah	20626	20828	41450

Sumber : Kecamatan Limapuluh dalam Angka, 2018



Gambar 4.2

Peta Administrasi Kecamatan Limapuluh

4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.3.1 Kelurahan Pesisir

Kelurahan Pesisir merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Limapuluh dengan luas wilayah 0,86 Km² (86 Ha) yang terletak di alur Sungai Siak yang terdiri dari 8 RW dan 26 RT. Berikut adalah luas wilayah kelurahan pesisir menurut RW :

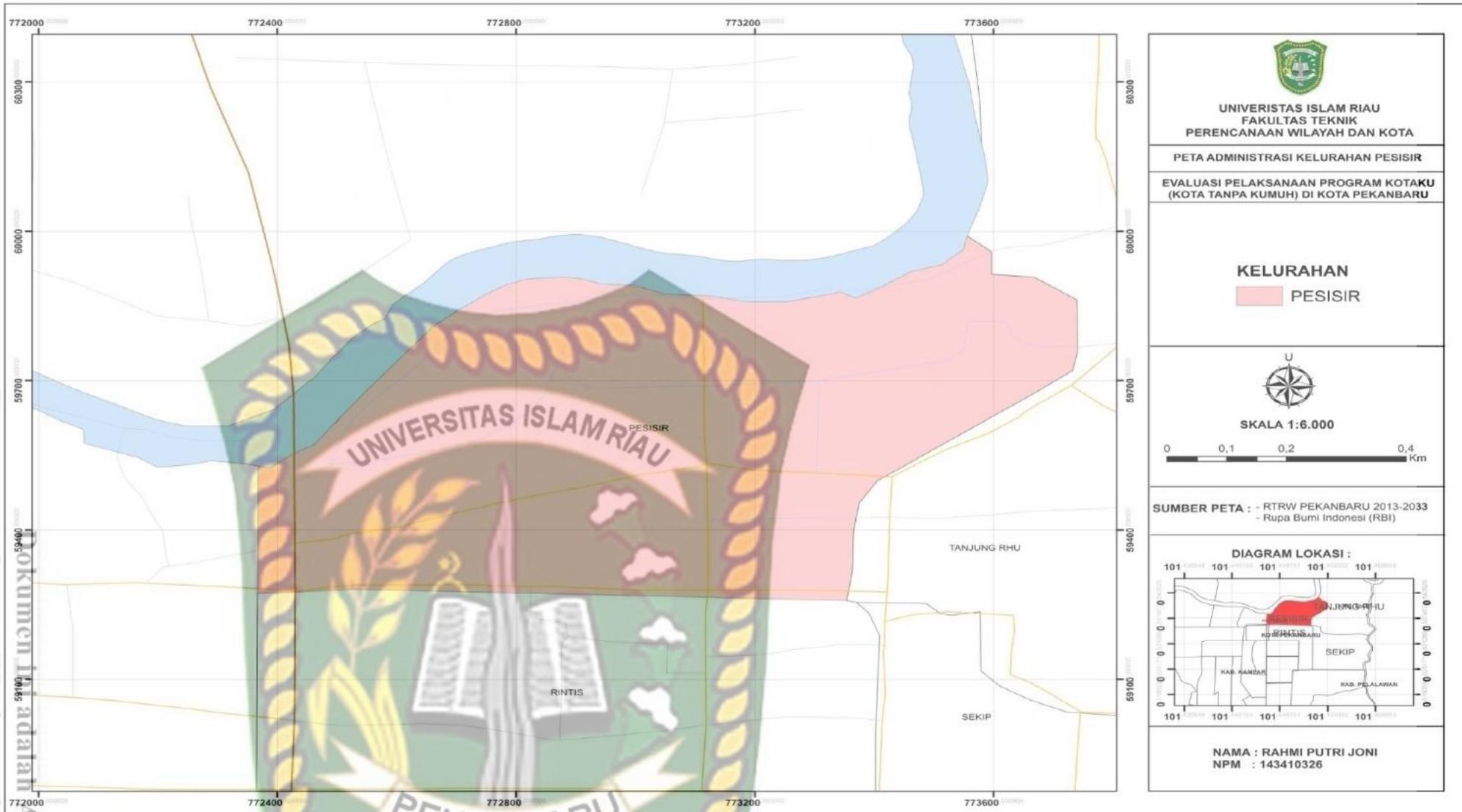
Tabel 4.6
Luas Wilayah Kelurahan Pesisir Menurut RW

No	Rukun Warga (RW)	Luas (Ha)
1	RW 1	3,78
2	RW 2	16,86
3	RW 3	10,17
4	RW 4	5,16
5	RW 5	7,2
6	RW 6	10,06
7	RW 7	6,75
8	RW 8	10,05
Jumlah		86

Sumber : Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pesisir, 2017

Kelurahan Pesisir secara geografis terletak antara 101⁰14' – 101⁰34' BT dan 0⁰25' – 0⁰45' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Siak
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Rintis
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Rhu



Gambar 4.3

Peta Administrasi Kelurahan Pesisir

4.3.2 Kependudukan Kelurahan Pesisir

Jumlah penduduk di Kelurahan Pesisir berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kecamatan Limapuluh Dalam Angka Tahun 2018 berjumlah 8771 orang yang terdiri dari 3947 penduduk berjenis kelamin laki – laki dan 4824 orang penduduk perempuan. Berikut adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	3947
2	Perempuan	4824
	Jumlah	8771

Sumber : Kecamatan Limapuluh dalam Angka 2018

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga

No	Rukun Warga	Jumlah Penduduk
1	RW 01	610
2	RW 02	1523
3	RW 03	1696
4	RW 04	1539
5	RW 05	946
6	RW 06	338
7	RW 07	754
8	RW 08	1229

Sumber : Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pesisir, 2017

4.3.3 Kawasan Kumuh Di Kelurahan Pesisir

Secara administratif Kelurahan Pesisir berada pada wilayah pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Limapuluh, namun untuk lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru melalui SK No. 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, maka permukiman kumuh Kelurahan Pesisir masuk dalam kelompok Kawasan Kumuh Pesisir di mana luas deliniasi kawasan

permukiman kumuh pesisir adalah sebesar 23,04 Ha, sedangkan untuk Kelurahan Pesisir sendiri hanya sebesar 6,34 Ha. Berdasarkan luasan tersebut maka wilayah administratif Kelurahan Pesisir yang masuk kedalam kawasan permukiman kumuh adalah SK Walikota Pekanbaru No.151 Tahun 2017 yaitu RW 01 (RT 01, RT 02), RW 02 (RT 01, RT 04) dan RW 08 (RT 03)

Tabel 4.9
Luasan deliniasi kumuh di kelurahan pesisir

No	Deliniasi Kumuh	Luas (Ha)
1	RW 1	2,00
2	RW 2	3,68
3	RW 8	0,62
	Total	6,30

Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pesisir, 2017

4.3.4 Kondisi Jalan Dan Drainase Di Kelurahan Pesisir

1. Kondsisi Jalan Lingkungan

Berdasarkan dokumen rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) Kelurahan Pesisir untuk indikator jalan lingkungan, panjang jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Pesisir adalah sepanjang 18.123 meter. Dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.10
Kondisi Jalan Lingkungan

No	Alamat RT/RW	Panjang Jalan(Meter)
1	RT 01-RW 01	300
2	RT 02-RW 01	1246
3	RT 01-RW 02	1000
4	RT 02-RW 02	1500
5	RT 03-RW 02	440
6	RT 01-RW 03	580
7	RT 02-RW 03	1200
8	RT 03-RW 03	650
9	RT 04-RW 03	900
10	RT 01-RW 04	477
11	RT 02-RW 04	800

No	Alamat RT/RW	Panjang Jalan(Meter)
12	RT 03-RW 04	650
13	RT 04-RW 04	250
14	RT 01-RW 05	600
15	RT 02-RW 05	335
16	RT 03-RW 05	750
17	RT 04-RW 05	900
18	RT 01-RW 06	550
19	RT 02-RW 06	300
20	RT 01-RW 07	600
21	RT 02-RW 07	600
22	RT 03-RW 07	300
23	RT 01-RW 08	1600
24	RT 02-RW 08	950
25	RT 03-RW 08	645
Total		18123

Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Pesisir, 2017

2. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan dokumen rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) Kelurahan Pesisir untuk indikator drainase lingkungan, panjang drainase lingkungan yang ada di Kelurahan Pesisir adalah sepanjang 17.216 meter. Dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.11
Kondisi Drainase Lingkungan

No	Alamat RT/RW	Panjang Drainase (Meter)
1	RT 01-RW 01	400
2	RT 02-RW 01	1226
3	RT 01-RW 02	1500
4	RT 02-RW 02	1800
5	RT 03-RW 02	200
6	RT 01-RW 03	700
7	RT 02-RW 03	300
8	RT 03-RW 03	530
9	RT 04-RW 03	1100
10	RT 01-RW 04	200
11	RT 02-RW 04	600
12	RT 03-RW 04	530
13	RT 04-RW 04	250
14	RT 01-RW 05	550
15	RT 02-RW 05	400
16	RT 03-RW 05	830
17	RT 04-RW 05	1300
18	RT 01-RW 06	350

No	Alamat RT/RW	Panjang Drainase (Meter)
19	RT 02-RW 06	210
20	RT 01-RW 07	600
21	RT 02-RW 07	800
22	RT 03-RW 07	330
23	RT 01-RW 08	1000
24	RT 02-RW 08	550
25	RT 03-RW 08	960
Total		17216

Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Pesisir, 2017



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai sasaran dalam Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pekanbaru tepatnya Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, adapun sasarannya yaitu yang pertama adalah teridentifikasi setiap indikator pelaksanaan pembangunan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir, dan yang kedua adalah teridentifikasi faktor penghambat dari pelaksanaan program KOTAKU dan faktor pendukung pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir.

Adapun identifikasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program KOTAKU di kelurahan pesisir berdasarkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Pesisir yang dilihat dari kesesuaian dan kesamaan antara rencana dan pelaksanaan dilapangan.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan ditingkat kelurahan atau desa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun atau ditata berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana. RPLP berupa dokumen rencana tata ruang yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000 atau 1:5.000 darisuatu kelurahan/desa. RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa.

5.1 Identifikasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Program KOTAKU di Kelurahan Pesisir

Identifikasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Dalam pembahasan sub bab ini terdapat 8 indikator yang akan diidentifikasi pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya pada program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yaitu diantaranya:

1. Bangunan Gedung

Menurut Kepmen Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengaman terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Dalam dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) terhadap kegiatan tahun 2017 dan 2018 yang direncanakan pada program KOTAKU dengan kebutuhan peningkatan rumah yang perlu dilaksanakan adalah 12 unit dan renovasi rumah 1 unit. Sedangkan pada pelaksanaan yang terlihat tidak adanya program rencana pada peningkatan dan revosi rumah yang terlaksana. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan pelaksanaan pada rencana peningkatan dan renovasi rumah adalah 0%.

2. Jalan Lingkungan

Menurut Joyopuspito dalam Djunaidi (2014), jalan lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jalan lingkungan terbagi lagi atas dua jenis, yaitu jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.

Pada program KOTAKU di Kelurahan Pesisir membuat rencana program yang salah satunya adalah jalan lingkungan yaitu jalan beton dan semenisasi/koral sikat. Rencana yang terealisasi untuk indikator jalan lingkungan tersebut sepanjang 1434,3 Meter.

3. Penyediaan Air Minum/Air Bersih

Menurut Radiana Triatmadja dalam Andrew (2018) air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pada dokumen RPLP terhadap kegiatan penambahan sumur dalam, pembangunan turap, peningkatan sumur dan pintu air direncanakan 11 unit sumur dalam, 22 meter pembangunan turap, 1 unit peningkatan sumur dan 1 unit pintu air. Sedangkan menurut kondisi eksisting di lapangan dengan beberapa rencana yang telah disebutkan sebelumnya tidak ada yang terlaksana.

4. Drainase Lingkungan

Menurut Suripin dalam Apriliana (2018) drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Program pembangunan infrastruktur pada drainase lingkungan yang direncanakan di Kelurahan Pesisir adalah pembangunan drainase dan gorong-

gorong. Rencana yang hanya terlaksana untuk indikator drainase lingkungan sepanjang 444 meter. Artinya terlaksana tetapi tidak sepenuhnya pada rencana pembangunan drainase lingkungan tersebut.

5. Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi

Menurut Apriliana (2018) sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir telah dibuat rencana pembangunan infrastruktur untuk MCK adalah 5 unit, sedangkan pada rencana tersebut pembangunan MCK yang terlaksana hanya dibangun 1 unit.

6. Pengelolaan Persampahan

Menurut Tchobanoglous *et.al* dalam Fadhilah (2011) pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan masyarakat luas.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program KOTAKU dibuat rencana untuk Kelurahan Pesisir untuk dilaksanakannya pembangunan pengelolaan persampahan bagi masyarakat, dengan adanya rencana tersebut yang terlaksana hanya adanya gerobak sampah dengan jumlah 2 unit, sedangkan pada rencana yang dibuat adalah tong sampah, hal ini dapat dikatakan bahwa

pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

7. Pengamanan Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, maka suatu bangunan harus memiliki sistem proteksi kebakaran, baik itu aktif maupun pasif, dilengkapi dengan kelengkapan tapak dan sarana penyelamatan.

Berdasarkan keadaan eksisting di Kelurahan Pesisir belum adanya rencana untuk pembangunan infrastruktur pengaman kebakaran pada tahun 2017 dan 2018 sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk infrastruktur pengaman kebakaran.

8. Ruang Terbuka Publik

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menyatakan bahwa RTH merupakan tempat tumbuh tanaman baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang atau mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi. Manfaat yang dihasilkan RTH kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Pada dokumen RPLP terdapat rencana pengadaan ruang terbuka publik (Taman) seluas 38 M² untuk Kelurahan Pesisir. Sedangkan pada kondisi yang

terlihat di kelurahan tersebut tidak terdapatnya ruang terbuka publik yang terlaksana oleh program KOTAKU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana tersebut tidak terlaksana.

Untuk lebih mengetahui dengan jelas tentang pemaparan teridentifikasinya pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dapat di lihat pada Tebel 5.1 capaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program KOTAKU di Kelurahan Pesisir pada Tahun 2017 dan 2018.



Tabel 5.1

Capaian Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada Program KOTAKU di Kelurahan Pesisir Pada Tahun 2017-2018

No	Kegiatan	Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Pembangunan Drainase Jl. Tanjung Medang	2017	264 Meter	0	0%
2	Peningkatan Jalan Beton	2017	75X1,2X1 Meter	0	0%
3	Semenisasi / Koral Sikat	2017	26X1,5X0,1Meter	27,8 Meter	100%
4	koral sikat	2017	1000x1,5 Meter	0	0%
5	Semenisasi / Koral Sikat	2017	75x2x0,15 Meter	0	0%
6	Drainase	2017	140X0,3X0,5Meter	0	0%
7	Drainase	2017	21x0,5x0,6 Meter	0	0%
8	Drainase	2017	21 Meter	21 Meter	100%
9	Jalan Beton	2017	200 Meter	0	0%
10	Jalan Beton	2017	68 Meter	68 Meter	100%
11	Drainase	2017	68 Meter	68 Meter	100%
12	MCK	2017	1 Unit	1 Unit	100%
13	Jalan Beton	2017	103 Meter	103 Meter	100%
14	Jalan Beton	2017	79,5 Meter	79,5 Meter	100%
15	Jalan Beton	2017	374 Meter	374 Meter	100%
16	MCK	2018	3 Unit	0	0%
17	Akses Menuju MCK(Jalan Beton dan Koral Sikat)	2018	12,4 X 2,8 Meter	0	0%
18	Jalan Beton dan Koral Sikat Drainase (Gorong-gorong)	2018	66,6 X 1,5 Meter	0	0%
19	Jalan Beton dan Koral Sikat	2018	145,3 X 1,5 Meter	115 X 1,5 Meter	79%
20	Drainase (Gorong-gorong)k	2018	1227,3 Meter	0	0%
21	Tong Sampah	2018	6 Unit	0	0%
22	Ruang Terbuka Publik(Taman)	2018	38 M2	0	0%
24	Sumur Dalam	2018	3 Unit	0	0%
25	Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%
26	Peningkatan Kualitas Jalan (Koral Sikat)	2018	1000 M	0	0%
27	Pembangunan Turap	2018	22 M	0	0%
28	Pembangunan Box Culvert	2018	1 Unit	0	0%
29	Drainase	2018	100X0,3X0,5 Meter	135 X0,3X 0,5 Meter	100%
30	Rumah Pompa	2018	1 Unit	0	0%
31	MCK+atap	2018	1 Unit	0	0%
32	Tong Sampah	2018	6 Unit	0	0%
33	Tong Sampah	2018	2 Unit	0	0%
34	Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%

No	Kegiatan	Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
35	Peningkatan Rumah	2018	2 Unit	0	0%
36	Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%
37	Peningkatan Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%
38	Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%
39	Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%
40	Peningkatan Sumur	2018	1 Unit	0	0%
41	Sumur Dalam	2018	3 Unit	0	0%
42	Sumur Dalam	2018	1 Unit	0	0%
43	Peningkatan Rumah	2018	10 Unit	0	0%
44	Renovasi Rumah	2018	1 Unit	0	0%
45	Pintu Air	2018	1 Unit	0	0%
Jumlah					979%
Rata-Rata					22%

Hasil Analisis, 2019



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir untuk tahun 2017-2018 hanya 22%. Dan di dalam *range* yang telah ditentukan pada Tabel 5.3 :

Tabel 5.2
Range Penilaian Keberhasilan Program

Range	Keterangan
76% - 100%	Berhasil
51% - 75%	Cukup Berhasil
26% - 50%	Kurang Berhasil
0% - 25%	Tidak Berhasil

Sumber: Fauzan, 2011

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir termasuk kedalam kategori Tidak Berhasil dikarenakan persentase yang kurang dari 25%.

Ketidakberhasilan pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir ini dikarenakan berbagai macam alasan yaitu :

1. Tidak sesuai pelaksanaan dengan SOP atau dokumen Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (RPLP) Kelurahan Pesisir, seperti pengadaan gerobak sampah yang awalnya tidak terdapat dalam dokumen RPLP, namun dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur program KOTAKU sehingga hal tersebut menjadi salah satu yang menjadi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan program KOTAKU karena kesesuaian pelaksanaan dengan SOP atau dokumen RPLP itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU Kelurahan Pesisir

2. Permasalahan dana atau keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Program KOTAKU di Kelurahan Pesisir. Dalam kegiatan program KOTAKU ini permasalahan dana dan keuangan menyebabkan kegiatan atau rencana tidak dapat terlaksana semua. Karena banyaknya wilayah yang masih harus dibenahi dan dana yang masuk tidak memungkinkan untuk membenahi semua. Jadi permasalahan biaya ini juga dapat menghambat tidak dilaksanakannya semua kegiatan di dalam program KOTAKU yang menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir.
3. Tidak semua lokasi kumuh di Kelurahan Pesisir termasuk dalam SK Kumuh Walikota dan juga tidak terdeliniasinya beberapa RT/RW yang ada di Kelurahan Pesisir, seperti RW 03 (RT 01, 02, 03, 04), RW 04 (RT 01, 02, 03, 04), RW 05 (RT 01, 02, 03, 04), RW 06 (RT 01, 02) dan RW 07 (RT 01, 02, 03). Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terlaksananya beberapa rencana yang ada di RPLP Kelurahan Pesisir dan juga membuat tidak teraturnya pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir.
4. Tidak terverifikasinya beberapa rencana yang ada di dokumen RPLP, yaitu kegiatan peningkatan jalan beton dan koral sikat. Sebelum memulai kegiatan, data tentang apa yang dikerjakan harus diverifikasi terlebih dahulu. Apabila data tersebut belum diverifikasi maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena semua harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam prosedur. Dan tidak terlaksananya kegiatan tersebut

membuat rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Pesisir tersebut.

5. Dana yang diberikan terhadap program KOTAKU tidak bisa digunakan untuk pembebasan lahan. Itu tidak termasuk dalam aturan pengeluaran dana program KOTAKU, jadi dana dalam program KOTAKU ini harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diatur untuk pengeluaran program tersebut hal itu menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat keberhasilan program tersebut. Karena beberapa rencana membutuhkan lahan untuk pembangunannya dikarenakan dana tersebut tidak dapat digunakan untuk pembebasan lahan maka beberapa rencana tidak dapat dilaksanakan.
6. Penggunaan lahan masyarakat sekitar untuk pelaksanaan program KOTAKU juga menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya dengan baik program KOTAKU tersebut karena terkadang masyarakat sekitar protes ketika lahan mereka terkena dalam pembangunan pelaksanaan program KOTAKU.
7. Tidak konsisten terhadap pelaksanaan dapat di lihat dari hasil yang didapatkan dari data perencanaan jika dibandingkan dengan data yang terealisasi terdapat banyak ketidakseimbangan yang mana hasil yang terealisasi lebih sedikit dari apa yang sudah direncanakan. Tetapi ada beberapa yang dibuat dan terealisasi meskipun tidak ada pada daftar perencanaannya. Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu responden yaitu RW 08 Kelurahan Pesisir, responden tersebut juga mengatakan terdapat ketidak-konsistenan antara daftar rencana dan yang

akan dibangun di lapangan. Seperti contoh responden mengatakan bahwa dalam daftar rencana dituliskan pada di RW 3 yang akan dijalankan kegiatan semenisasi tetapi saat ingin dibangun kegiatan semenisasi itu dipindahkan ke RW 8. Itu membuktikan tidak sesuai daftar perencanaan dengan daftar yang terealisasi. Menurut penulis kesalahannya disini adalah, saat mereka mengubah kegiatan yang ingin dikerjakan, mereka langsung mengubah dan mengerjakannya tanpa menggantinya di dalam daftar rencana, jadi data rencana tidak sesuai dengan apa yang sudah di realisasikan.

Berikut adalah Tabel kegiatan yang sudah terealisasi tetapi tidak ada pada daftar rencana :

Tabel 5.3
Kegiatan Yang Sudah Terealisasi Tetapi Tidak Termasuk Pada RPLP 2017-2018

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Lokasi
1	2017	Jalan Beton	93	M	RT002-RW002
2	2017	Jalan Beton	96	M	RT002-RW002
3	2017	Jalan Beton	111	M	RT002-RW002
4	2017	Jalan Beton	5	M	RT002-RW002
5	2018	Drainase Lingkungan	97	M	RT001-RW002
6	2018	Drainase Lingkungan	14	M	RT001-RW002
7	2018	Drainase Lingkungan	24	M	RT001-RW002
8	2018	Jalan Beton	109	M	RT001-RW002
9	2018	Jalan Beton	60	M	RT001-RW002
10	2018	Jalan Beton	32	M	RT001-RW002
11	2018	Jalan Beton	40	M	RT002-RW001
12	2018	Jalan Beton	121	M	RT001-RW002
13	2018	Drainase Lingkungan	60	M	RT002-RW001
14	2018	Drainase Lingkungan	25	M	RT002-RW001
15	2018	Gerobak Sampah	1	Unit	RT002-RW001
16	2018	Gerobak Sampah	1	Unit	RT003-RW008

Sumber : Data Realisasi 2017-2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pesisir terdapat adanya bentuk partisipasi masyarakat seperti :

1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat atau musyawarah dalam program KOTAKU
2. Kesiediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program KOTAKU demi menunjang keberhasilan program tersebut
3. Kesiediaan masyarakat untuk melestarikan hasil-hasil pembangunan dalam program KOTAKU, seperti saling menjaga kebersihan MCK yang telah dibangun di Jalan Tanjung Karang RT 01 RW 01. Menggunakan fasilitas gerobak sampah yang telah direalisasikan dalam program KOTAKU. Bergotong royong dalam menjaga kebersihan jalan dan drainase yang telah direalisasikan oleh program KOTAKU
4. Adanya pemberian saran dan kritik dari masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU, seperti saran untuk menambahkan beberapa unit MCK di Kelurahan Pesisir karena sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat serta pembangunan dan perbaikan drainase yang ada di Kelurahan Pesisir.

5.2 Peningkatan Akses Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman melalui Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Pesisir

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman

kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dengan indikator kumuh seperti, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran. Dengan indikator kumuh tersebut di harapkan pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dapat meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman yang ada di Kelurahan Pesisir.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir ada yang meningkat dan ada yang tidak meningkat, indikator yang meningkat diantaranya yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi/pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan. Dan indikator yang tidak meningkat yaitu bangunan gedung, penyediaan air minum, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran.

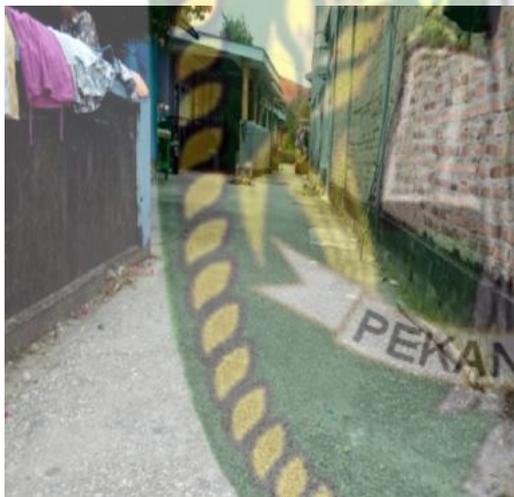
5.2.1 Bangunan Gedung

Menurut dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Pesisir jumlah kepadatan bangunan Kelurahan Pesisir adalah 826 (65 %), dengan tingkat kepadatan bangunan rata-rata sebesar 27 unit/ha. Dalam dokumen RPLP untuk kegiatan tahun 2017 dan 2018 direncanakan peningkatan rumah sebanyak 12 unit dan renovasi rumah 1 unit.

Sedangkan realisasi pelaksanaan pembangunan peningkatan rumah dan renovasi rumah pada tahun 2017 dan 2018 tidak terealisasi. Sehingga persentase kegiatannya 0 %.

5.2.2 Jalan lingkungan

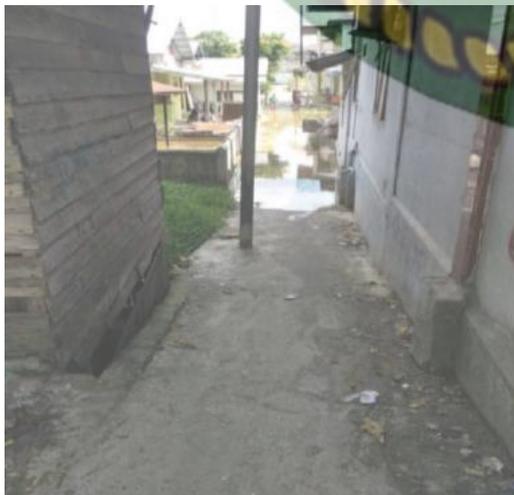
Infrastruktur yang mengalami peningkatan terhadap pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir yaitu jalan lingkungan. Jalan di Kelurahan Pesisir yang daerahnya termasuk dalam deliniasi kumuh yaitu RW 1, RW 2 dan RW 8 mempunyai panjang jalan 7681 meter, pembangunan dan perbaikan jalan yang telah dilakukan dengan adanya program KOTAKU sepanjang 1434,3 meter. Jadi peningkatan terhadap akses infrastruktur jalan lingkungan sebesar 18,67 %. Dan peningkatan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum

Sesudah

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2019

Gambar 5.1 Sesudah dan Sebelum Pembangunan Jalan Lingkungan

Berdasarkan gambar tersebut pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Pesisir terjadi di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Tanjung Karang dengan panjang jalan ± 374 Meter, Jalan Tanjung Datuk dengan panjang $\pm 79,50$ Meter dan Jalan Tanjung Batu dengan panjang jalan ± 103 Meter.

Dengan adanya pembangunan jalan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari khususnya dalam mengakses jaringan jalan tersebut. Sebelumnya terdapat beberapa masalah di beberapa ruas jalan yang ada di Kelurahan Pesisir seperti adanya genangan yang menutupi ruas jalan setelah turunnya hujan, kecilnya lebar jalan di beberapa Kelurahan Pesisir membuat akses terhadap jalan tersebut menjadi tidak maksimal.

5.2.3 Penyediaan Air Bersih/Air Minum

Menurut dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Pesisir pada indikator Air Minum, jumlah masyarakat terlayani sarana air minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga) adalah sebesar 855 (64%).

Dalam dokumen RPLP kegiatan penambahan sumur dalam , pembangunan turap, peningkatan sumur dan pintu air direncanakan 11 unit sumur dalam, 22 meter pembangunan turap, 1 unit peningkatan sumur dan 1 unit pintu air. Tetapi dari semua rencana tersebut tidak satupun yang terealisasi ataupun mengalami peningkatan.

5.2.4 Drainase Lingkungan

Infrastruktur selanjutnya yang mengalami peningkatan dengan adanya Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir yaitu drainase lingkungan. Drainase lingkungan pada daerah yang terdeliniasi kumuh di Kelurahan Pesisir yaitu sepanjang 7637 meter, dengan adanya program KOTAKU telah dilakukan pembangunan drainase sepanjang 444 meter. Sehingga peningkatan yang terjadi terhadap infrastruktur drainase lingkungan hanya 5,81 % dan peningkatan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sebelum



Sesudah



Sebelum

Sesudah

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2019

Gambar 5.2
Sebelum dan Sesudah Pembangunan Drainase

Berdasarkan gambar tersebut pembangunan drainase di Kelurahan Pesisir terjadi di beberapa ruas jalan salah satunya di Jalan Tanjung Karang. Dengan adanya pembangunan drainase tersebut dapat meningkatkan akses infrastruktur tersebut seperti, dapat mengalirkan limpahan air hujan yang berlebihan dengan aman sehingga drainase ini berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan untuk memperbaiki dan mengurangi kebecakan, genangan air dan banjir.

Tetapi pembangunan drainase di Kelurahan Pesisir ini belum memadai, dari hasil survey banyak yang menyarankan agar pembangunan drainase bisa lebih di tingkatkan lagi di setiap jalan yang ada di Kelurahan Pesisir.

5.2.5 Sanitasi/Pengelolaan Air Limbah

Infrastruktur yang mengalami peningkatan dengan adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir salah satunya sanitasi/pengelolaan air limbah yaitu dengan pembanguan MCK.

Menurut Bramanta (2008) MCK untuk penyehatan lingkungan pemukiman. Berfungsi untuk melayani masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus pribadi, sehingga memiliki kebiasaan yang dianggap kurang sehat dalam melakukan kebutuhan mandi, cuci dan buang airnya. Lokasi MCK jenis ini idealnya harus ditengah para penggunaannya/ pemanfaatnya dengan radius 50 –100m dari rumah penduduk dan luas daerah pelayanan maksimum untuk 1 MCK adalah 3 ha.

Daerah yang terdeliniasi kumuh di Kelurahan Pesisir terdapat pada 3 RW yaitu RW 1 , RW 2 dan RW 8 dengan luas wilayahnya sebesar 30,69 Ha. Jika untuk pembangunan 1 MCK luas daerah pelayanan maksimum 3 Ha maka di daerah kumuh Kelurahan Pesisir membutuhkan pembangunan ±11 MCK.

Dengan adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir telah dibangun 1 unit MCK, akan tetapi masih dibutuhkan 10 pembangunan MCK lagi. Jadi peningkatan terhadap akses infrastruktur pengelolaan air limbah di Kelurahan Pesisir itu hanya sebesar 9,09 %. Dan peningkatan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sebelum



Sesudah

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2019

Gambar 5.3
Sesudah dan Sebelum Pembangunan MCK

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa hasil Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) telah membangun 1 Unit MCK yang terletak di Jalan Tanjung Karang RT 01 RW 01. Akses terhadap MCK ini sangat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sehari-hari masyarakat sekitar sehingga masyarakat menyarankan untuk menambah unit MCK yang terdapat di Kelurahan Pesisir .

5.2.6 Pengelolaan Persampahan

Infrastruktur selanjutnya yang mengalami peningkatan terhadap pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir yaitu dengan pemberian gerobak sampah. Jumlah penduduk untuk daerah yang terdeliniasi kumuh yaitu sebesar 3362 jiwa. Dalam SNI Pengelolaan Sampah di Permukiman Tahun 2008 untuk spesifikasi peralatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.4
Spesifikasi Peralatan

No	Jenis Peralatan	Kapasitas Pelayanan			Umur Teknis (Tahun)
		Volume	KK	Jiwa	
1	Wadah Komunal	0,5 - 1,0 m ³	20 – 40	100 - 200	
2	Komposter Komunal	0,5 - 1,0 m ³	10 – 20	50 – 100	
3	Alat pengumpul: Gerobak sampah bersekat/sejenisnya	1 m ³	128	640	2 – 3
4	Container armroll truk	6 m ³	640	3.200	5 – 8
		10 m ³	1.375	5.330	
5	TPS Tipe I	100 m ²	500	2.500	20
	Tipe II	±300 m ²	6000	30.000	
	Tipe III	±1000 m ²	24.000	120.000	
6	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	150 m ²	600	3.000	20

Sumber: SNI Pengelolaan Sampah di Permukiman Tahun, 2008

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 1 gerobak sampah itu bisa menampung sampah untuk 640 jiwa. Dan dari daerah yang terdeliniasi kumuh di Kelurahan Pesisir terdapat 3362 jiwa. Berdasarkan standar seharusnya pemberian gerobak sampah di daerah kumuh tersebut sebanyak 5 unit. Akan tetapi pemberian gerobak sampah baru diberikan sebanyak 2 unit dan untuk peningkatan terhadap infrastruktur pengelolaan persampahan yaitu sebesar 40%. Dan peningkatan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2019

Gambar 5.4
Gerobak Sampah yang diberikan Program KOTAKU

5.2.7 Ruang Terbuka Publik

Berdasarkan kondisi eksisting di Kelurahan Pesisir belum terdapat kawasan ruang terbuka publik. Dalam dokumen RPLP terdapat rencana pengadaan ruang terbuka publik (Taman) seluas 38 M². Tetapi tidak ada realisasi untuk kegiatan pengadaan ruang terbuka publik tahun 2017-2018. Sehingga untuk indikator ruang terbuka publik tidak mengalami peningkatan.

5.2.8 Pengamanan Kebakaran

Berdasarkan keadaan eksisting di Kelurahan Pesisir belum terdapat infrastruktur untuk pengaman kebakaran, sedangkan dalam dokumen RPLP untuk

tahun 2017 dan 2018 juga tidak terdapat rencana kegiatan pengadaan pengaman kebakaran. Sehingga tidak adanya peningkatan untuk pengamanan kebakaran di Kelurahan Pesisir

5.2.9 Rekapitulasi Peningkatan Terhadap Akses Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui infrastruktur apa saja yang mengalami peningkatan di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan dilaksanakannya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5
Rekapitulasi Peningkatan Akses Infrastruktur

No	Infrastruktur	Realisasi	Kebutuhan	Persentase Peningkatan
1	Pengelolaan Air Limbah	1	11	9,09%
2	Jalan Lingkungan	1434,3 m	7681 m	18,67%
3	Drainase Lingkungan	444 m	7636 m	5,81%
4	Pengelolaan Persampahan	2 unit	5 unit	40%
Persentase = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100$				

Sumber : Hasil Analisis, 2019

5.3 Identifikasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat melalui Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Analisis ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui indeks kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman dengan metode pengumpulan data menyebar kuisioner sebanyak 99 sampel. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam kuisioner, beberapa diantaranya adalah : 1) Pendapatan 2) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga 3) Keadaan tempat tinggal 4) fasilitas tempat tinggal 5)

kesehatan anggota keluarga 6) kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 7) kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan dan 8) kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Hasil dari kuisioner terdapat 99 KK dengan jumlah 65 responden berjenis kelamin Laki-laki dan 34 responden berjenis kelamin Perempuan, dengan rentang umur 18-31 tahun sebanyak 19, 32-46 tahun sebanyak 62 dan >64 tahun sebanyak 18. Pekerjaan 15 Pedagang dan 84 Lainnya seperti wiraswasta, IRT (Ibu Rumah Tangga), pekerja bangunan dan lainnya. Dengan jumlah anggota keluarga 1-3 orang sebanyak 15, 4-6 orang sebanyak 59 dan >6 orang sebanyak 5.

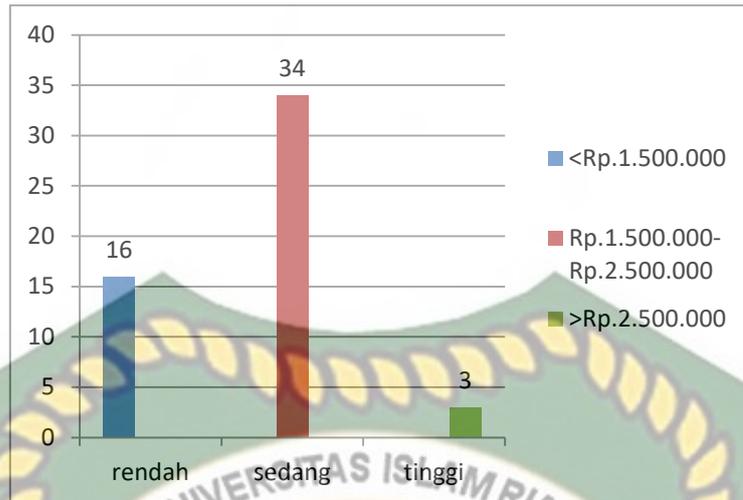
5.3.1 Pendapatan

Pendapatan masyarakat yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* < Rp.1.500.000 dengan kategori rendah sedangkan *range* Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 termasuk kepada kategori sedang dan >Rp.2.500.000 tergolong pendapatan yang tinggi. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa masyarakat yang berpenghasilan <Rp.1.500.000 sebanyak 16 KK, masyarakat yang berpenghasilan Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 dengan jumlah 34 KK dan yang berpenghasilan >Rp.2.500.000 sebanyak 3 KK. Sedangkan masyarakat yang tidak menjawab sebanyak 46 KK. Hasil kuisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.6
Jumlah Responden menurut Pendapatan

Keterangan	Penghasilan	Jawaban Responden (KK)
Rendah	<Rp.1.500.000	16
Sedang	Rp.1.500.000-Rp.2.500.000	34
Tinggi	>Rp.2.500.000	3
Tidak menjawab		46

Sumber : Hasil Analisis 2019



Sumber : Hasil Analisis 2019

Gambar 5.5
Grafik Jumlah Responden menurut Pendapatan

5.3.2 Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga

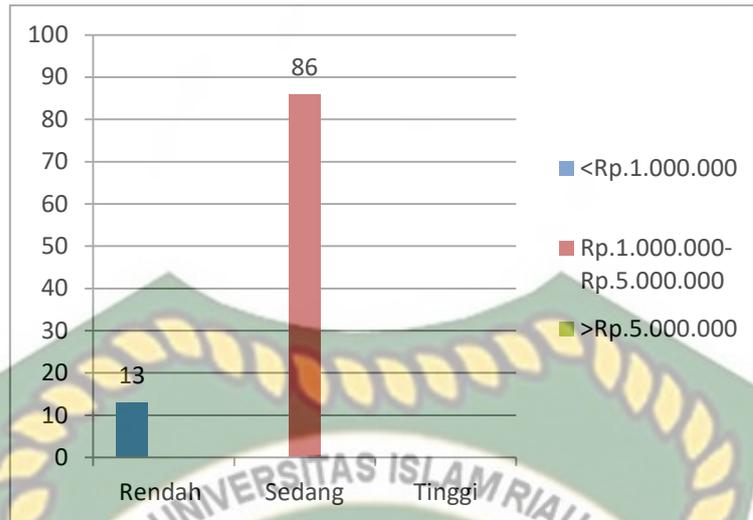
Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* <Rp.1.000.000 sampai >Rp.5.000.000 berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner terdapat 13 KK yang pengeluarannya rendah dengan nilai uang <Rp.1.000.000 dan 86 KK yang pengeluaran rumah tangganya sedang dengan nilai uang Rp.1.000.000-Rp.5.000.000. Hasil kuisisioner dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.7

Jumlah Responden menurut Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga

Keterangan	Penghasilan	Jawaban Responden (KK)
Rendah	<Rp.1.000.000	13
Sedang	Rp.1.000.000-Rp.5.000.000	86
Tinggi	>Rp.5.000.000	0

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis 2019

Gambar 5.6

Grafik Jumlah Responden menurut Konsumsi Rumah Tangga

5.3.3 Keadaan Tempat Tinggal

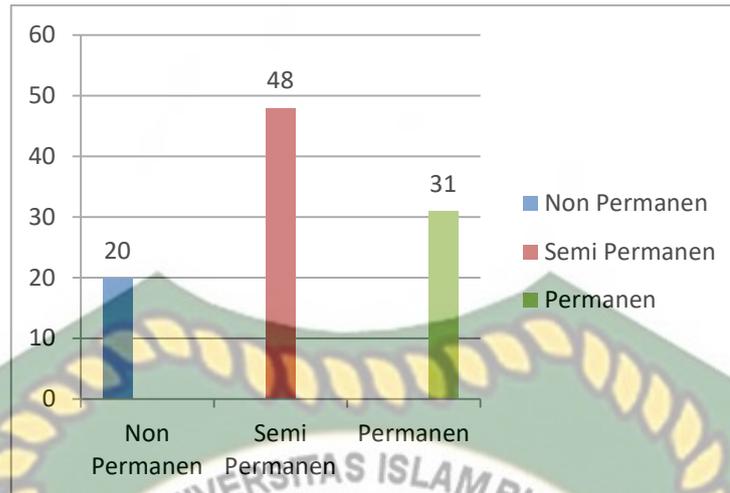
Keadaan Tempat Tinggal masyarakat yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam rata-rata keadaan non permanen, semi permanen dan permanen berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner terdapat 20 KK bertempat tinggal dengan keadaan rumah non permanen, 48 KK dengan keadaan tempat tinggal Semi permanen dan 31 KK dengan keadaan tempat tinggal Permanen. Hasil kuisisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.8

Jumlah Responden menurut Keadaan Tempat Tinggal

Keadaan Tempat Tinggal	Keterangan	Jawaban Responden (KK)
	Non Permanen	20
Semi Permanen	48	
Permanen	31	

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.7

Grafik Jumlah Responden menurut Keadaan Tempat Tinggal

5.3.4 Fasilitas Tempat Tinggal

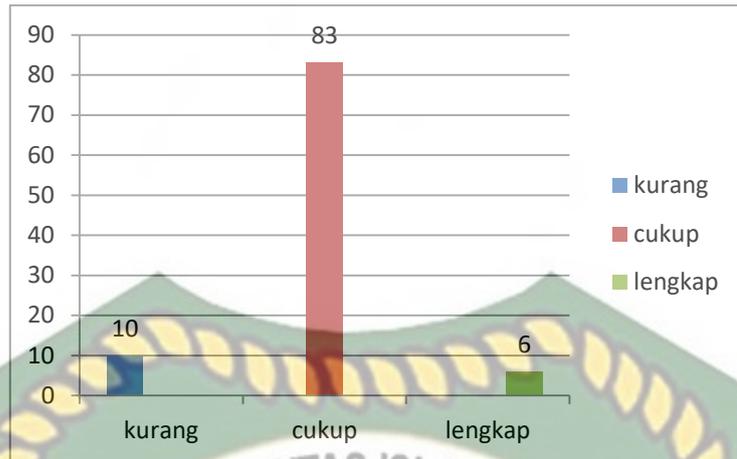
Fasilitas tempat tinggal yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* kurang, cukup, dan lengkap. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner terdapat 10 KK yang menyatakan kurang, 83 KK yang menyatakan cukup dan 6 KK yang menyatakan lengkap. Hasil kuisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 5.9

Jumlah Responden Menurut Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas Tempat Tinggal	Keterangan	Jawaban Responden (KK)
	Kurang	10
	Cukup	83
Lengkap	6	

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.8
Jumlah Respondnien menurut Fasilitas Tempat Tinggal

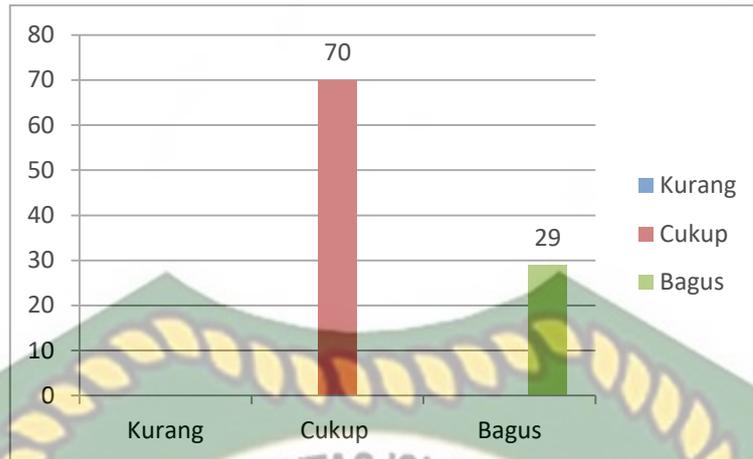
5.3.5 Kesehatan Anggota Keluarga

Kesehatan Anggota Keluarga yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* kurang, cukup dan bagus. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner terdapat 70 KK yang menyatakan cukup dan 29 KK menyatakan bagus. Hasil kuisisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.10
Jumlah Respondnien menurut Kesehatan Anggota Keluarga

Kesehatan Anggota Keluarga	Keterangan	Jawaban Responden (KK)
	Kurang	0
Cukup	70	
Bagus	29	

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.9
Jumlah Responden menurut Kesehatan Anggota Keluarga

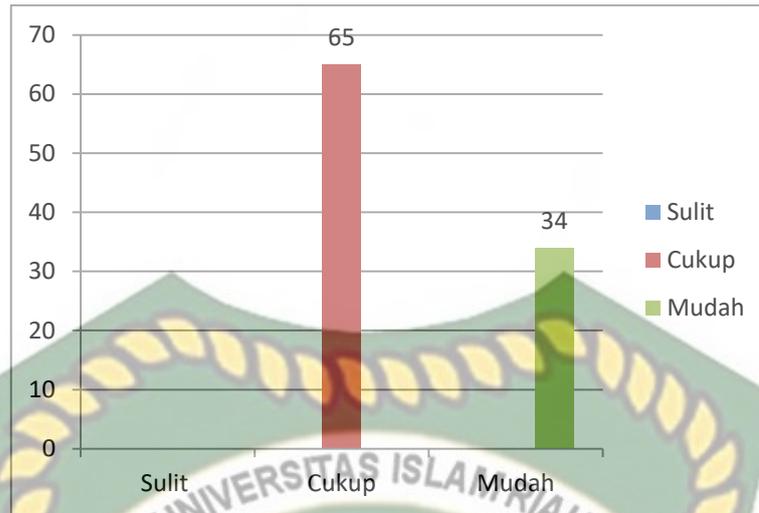
5.3.6 Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan masyarakat yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* sulit, cukup, dan mudah. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner terdapat 65 KK yang menyatakan cukup dan 34 KK yang menyatakan mudah. Hasil kuisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.11
Jumlah Responden menurut Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Keterangan	Jawaban Responden (KK)
	Sulit	0
	Cukup	65
	Mudah	34

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis 2019

Gambar 5.10
Jumlah Responden menurut Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

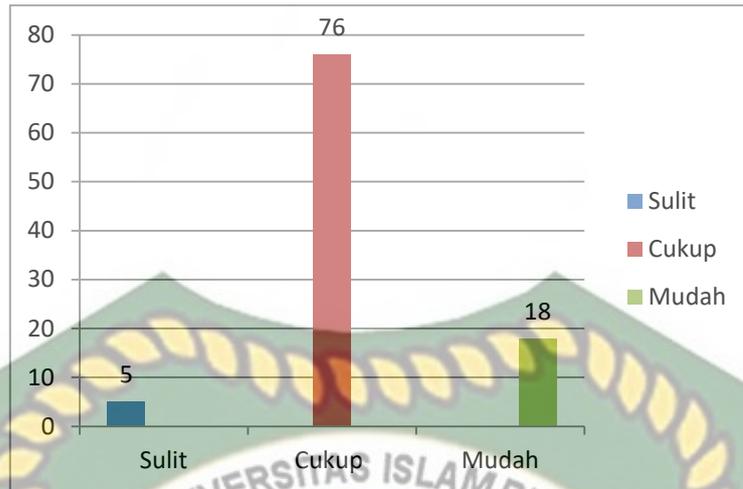
5.3.7 Kemudahan Memasukan Anak Ke Jenjang Pendidikan

Kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* sulit, cukup dan mudah. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner terdapat 5 KK yang menyatakan sulit, 76 KK yang menyatakan sedang dan 18 KK yang menyatakan mudah. Hasil kuisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.12
Jumlah Responden menurut Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan

Kemudahan Memasukan Anak ke Jenjang Pendidikan	Keterangan	Jawaban Responden (KK)
	Sulit	5
	Cukup	76
	Mudah	18

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.11

Jumlah Responden menurut Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan

5.3.8 Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

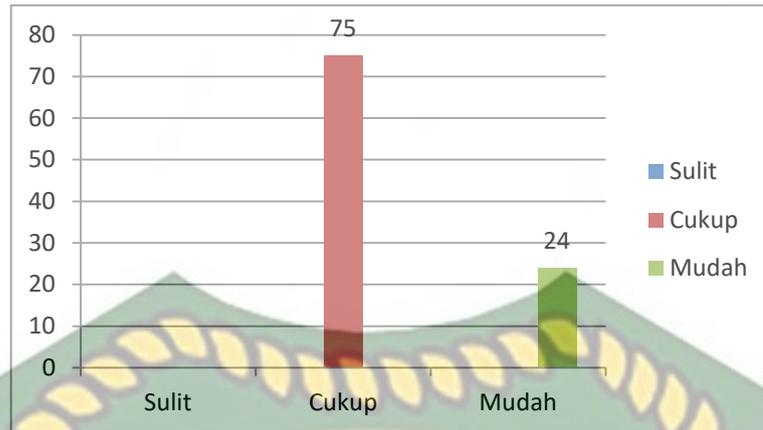
Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang ada di Kelurahan Pesisir terdapat dalam *range* sulit, cukup dan mudah. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner terdapat 75 KK yang menyatakan cukup dan 24 KK yang menyatakan mudah. Hasil kuisioner ini dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.13

Jumlah Responden menurut Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi	Keterangan	Jawaban Responden (KK)
	Sulit	0
Cukup	75	
Mudah	24	

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.12

Jumlah Responden menurut Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

5.3.9 Rekapitulasi Hasil Responden Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui seberapa tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.14

Rekapitulasi Hasil Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pesisir

Variabel	Kategori	Jumlah (KK)	Persentase
Kesejahteraan Masyarakat	Tinggi	4	4,04%
	Sedang	86	86,86%
	Rendah	9	9,09%

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 5.15

Penilaian Indikator Keluarga Sejahtera

Kategori	Range
Tinggi	20 – 24
Sedang	14 - 19
Rendah	8 - 13

Sumber : BPS dalam Sugiharto, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Pesisir dengan sampel 99 KK yang termasuk kedalam tingkat kesejahteraan tinggi berjumlah 4 KK dengan persentase 4,04%, yang termasuk kedalam tingkat kesejahteraan sedang berjumlah 86 KK dengan persentase 86,86% dan yang termasuk kedalam tingkat kesejahteraan rendah 9 KK dengan persentase 9,09%.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil persentase pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir pada tahun 2017-2018 untuk pembangunan infrastrukturnya itu hanya sebesar 22 % dan masih ada 78% lagi yang belum terealisasi.
2. Akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU Kelurahan Pesisir yang sudah meningkat adalah jalan lingkungan 18,67 %, drainase lingkungan 5,81%, pengelolaan air limbah 9,09% dan pengolahan persampahan 40%.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas permukiman dengan 99 sampel KK yang termasuk kategori rendah sebesar 9,09%, sedang sebesar 86,86% dan tinggi 4,04%.

6.2 Saran

1. Harus adanya kematangan dalam perencanaan program KOTAKU dalam dokumen RPLP agar terdapat keseimbangan antara yang telah direncanakan dan apa yang sudah terealisasikan. Dan agar meminimalisir terjadinya kesalahan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga target dapat terwujud secara maksimal.

2. Perlu adanya peningkatan dalam menjalankan program KOTAKU ini agar akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman melalui pelaksanaan program KOTAKU meningkat keseluruhannya tidak hanya beberapa saja yang meningkat.
3. Kedepannya diharapkan program KOTAKU ini dapat memfasilitasi tingkat kesejahteraan masyarakat agar tingkat kesejahteraannya dapat berdampak kepada seluruh masyarakat terutama di Kelurahan Pesisir .



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Agus, Firdaus. 2018. *Teknik Evaluasi Perencanaan*. Bahan Kuliah & Bacaan di Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Arikunto, Suharismi dan Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. PT Bumi Asmara: Jakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Koombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. 2016. *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

B. Kelompok Skripsi

- Andreeyan, Rizal. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Ardhi, Krisna Wicaksono. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (DEWI) Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bramanta, Bagas. 2018. *Kajian sanitasi MCK umum di Kelurahan Bener tegalrejo Yogyakarta*. Fakultas Kesehatan Lingkungan. Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Yogyakarta.
- Cakrawijaya, Muhammad Amin. 2013. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan*. Magister Teknik Sipil. Universitas Diponegoro Semarang.
- Erowati, Maria Tri. 2017. *Evaluasi Program Regrouping SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*. Magister Manajemen Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

- Hidayanti, Rini. 2013. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda*. Fakultas Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman.
- Purba, Yanti. 2016. *Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun : Studi Komperatif Antara Petani Padi Dengan Petani Jagung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, Bakti. 2003. *Pembangunan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatif, Konsep Dasar dan Faktor-faktor Kesuksesan*. Makalah pada pelatihan Participatory Planning, MPKD UGM Bekerjasama dengan Bali Urban Infrastructure Programme (BUIP).
- Zulyanti, Dewi. 2017. *Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai Model Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri raaden Intan Lampung.

C. Kelompok Jurnal

- Andrew, Alfredo. 2018. *Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Rambunan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Fakultas Teknik .Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 6 No 12
- Aprillian, Sahria. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan teritip Kota Balikpapan)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Vol 6 No1
- Dinata, Apriyan. 2013. *Peran Infrastruktur Di Dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota. Universitas Islam Riau.
- Djunaidi, Eddy. 2014. *Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota*

Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Vol 3 No 1

Fadhilah, Arif. 2011. *Kajian Pengelolaan Sampah Kampus*. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Vol 11 No 2

Greene, J., Solomon. 2003. *Staged Cities : Mega-events, Slum Clearance, and Global Capital*. Yale Human Rights and Development Law Journal. Volume 6

Yuliani, Sri. 2017. *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol 1 No 2

D. Kelompok Dokumen

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Limapuluh dalam Angka*

Badan Pusat Statistik. 2015. *Indikator kesejahteraan Rakyat*

Keputusan Menteri Nomor 10/KPTS/2000 *Tentang Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 *Tentang Jalan*

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Pesisir 2017

Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*

E. Kelompok Web

portalberitaeditor.com

kotaku.pu.go.id

holescience.blogspot.com